



Katalog BPS : 7203002

Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi

Financial Statistics of Province Governance

2009-2012



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi

Financial Statistics of Province Governance



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI 2009-2012

Financial Statistics of Province Governance 2009-2012

ISSN. 0126.7906

No. Publikasi / Publication Number : 06310.1302

Katalog BPS / BPS Catalogue : 7203002

Ukuran Buku / Book Size : 29,7 Cm x 21 Cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : 143 halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Subdirectorate of Financial Statistics

Gambar Kulit / Cover design :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Subdirectorate of Statistical Compilation and Publication

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS – Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Bagian Penggandaan

Printing Division

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diolah dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari kantor Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Survei Keuangan Daerah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi, untuk periode tahun 2009-2011. Selain data realisasi APBD, publikasi ini memuat pula data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Jakarta, Maret 2013
Kepala Badan Pusat Statistik,



Dr. Suryamin, M.Sc.

INTRODUCTION

Provincial Government Financial Statistics is an annual publication that compiled and published by BPS-Statistic Indonesia. The financial data are obtained from the office of the provincial government through the Financial Survey conducted throughout Indonesia.

The data presented in this publication contains data on the realization of Revenue and Expenditure (Budget realization) of the provincial government, for the years 2009-2011. In addition, this publication also contains data on State Revenue and Expenditure in 2012.

We are grateful and thank to all those who have given their support which make this publication presented. Contructive criticisms and suggestions from the users are expected for further improvement.

Jakarta, March 2013

BPS-STATISTICS INDONESIA



Dr. Suryamin, M.Sc.
Chief Statistician

DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
	<i>PAGE</i>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i>	1
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i>	19

TABEL

TABLE

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2009-2012</i>	37
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan / <i>Actual Receipts of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt 2009-2012</i>	43
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia 2009-2012</i>	79
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia 2009-2012</i>	91
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran / <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2009-2012</i>	95

DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u> <i>TABLE</i>	<u>HALAMAN</u> <i>PAGE</i>
5A. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/ <i>Actual Indirect Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2009-2012</i>	131
5B. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2009-2012</i>	140
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2009-2012</i>	144

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia selama empat periode tahun anggaran, yaitu tahun 2009 sampai dengan 2012.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing provinsi.
- c. Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masing-masing provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan dari

I. GENERAL EXPLANATION

I.1. Preliminary

Provincial Government Finance Statistics publication covers data on Receipts and Expenditures of provincial governments all around Indonesia for the four fiscal years, ie 2009 to 2012.

Some indicators / important information covered in the publication of Provincial Government Finance Statistics, among others are:

- a. Information on actual revenues and expenditures of Provincial Government.*
- b. Information on the potential and the contribution of fund sources in each province.*
- c. Information to determine the type and amount of grant / relief fund for each province, both the Special Allocation Fund (DAK) and the General Allocation Fund (DAU).*

In other words, the Provincial Government Finance Statistics publication can be used as an indicator to assess the potential and capabilities of each provinces, in an attempt to

masing-masing provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur masing-masing provinsi yang dikumpulkan melalui survei Keuangan Daerah dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1.

I.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi adalah realisasi / perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

improve the welfare of local communities in its region.

I.2. Scope and Data Collection Method

Provincial Government Finance Statistics data is obtained from Finance and Asset Management Agency Regional Office of the Governor all over Indonesia through Financial Survey by using the questioner K-1 and APBD-1.

1.3. Concept and Definition

Actual Revenue and Expenditure of Provincial Government is the realization / provincial budget calculations for every fiscal year.

Revenue

Revenue consists of:

- a. *Original Local Government Revenue*
- b. *Balanced Budget*
- c. *Other Legal Revenue*

Original Local Government Revenue is revenue that withheld based on local regulations in accordance with the

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah Yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan

legislation, for the purposes of financing their activities. PAD consists of local taxes, retributions, income of regional government corporate and management of separated regional government wealth and other local government revenue.

Local Taxes is revenue that levied based on the local laws and regulations. Local taxes can be divided into two categories: 1) local tax that set up by local rule, and 2) state tax that are managed and used by the local government. Local tax revenues consist of motor vehicle tax, title transfer tax, motor vehicle fuel tax, and others.

Retributions is a levy taken in accordance with any services or facilities provided by the local government directly to taxpayers. Retributions include health care, testing of motor vehicles, the replacement cost of printing maps, fishing vessel testing,

bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

the use of regional assets, wholesale or retail markets, the sale of local production, the land use designation permits, licenses route of public transport and other.

Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Regional Government wealth is revenue in the form of income of regional government corporate and separated regional government wealth which consists of the Regional Water Company's earnings, the profit share of bank, the profit share of non-banking financial institutions, the other locally-owned company's profits, and the return on equity / investment to a third party.

Other Original Local Government Revenue is the revenue of local government that includes the sale of regional assets that can not be separated, giro services, interest income and commissions, discounts or other forms as a result of the sale and / or supply of goods and / or services by region.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan

***Balanced Budget** is the fund coming from the state budget that allocated to regions to fund their needs in the context of decentralization. Balanced budget consists of Tax share / Non Tax share, General Allocation Fund (DAU), and the Special Allocation Fund (DAK).*

***Tax share** consists of land and building tax (PBB), customs of land and buildings right (BPHTB), income tax of Article 25 and Article 29, and Article 21 of the Personal Income Tax, and others.*

***Non-Tax Share** consist of dues of utilization right of forest (HPH), provision of forest resources (PSDH), land titling state, landrent, dues of exploration / exploitation / royalties, levies on fishery enterprise and result of fishery, mining oil / gas nature result, and others.*

***General Allocation Fund (DAU)** is the transfer of fund from the central government to local government that is intended to reduce the fiscal gap and the equalization of fiscal capacity*

untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

across regions in order to support the independence of local governments in carrying out its functions and duties to serve the public.

Special allocation fund (DAK) is a fund set up to the region to meet specific need. There are three criterias for special needs as set out in the legislation, namely:

- *The need can not be calculated by using the formula of the general allocation fund*
- *The need is a commitment or a national priority*
- *The need is to finance reforestation and afforestation*

Thus DAK is basically a specific transfer for the purposes that have been outlined.

Other Legal Revenue is other income that coming from the central government and or from the central agencies, as well as from other local government. Other revenue comprises; grants; emergency fund, which is fund of the state budget allocated to areas

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; bantuan dana kontijensi/ penyeimbang/ penyesuaian dari pemerintah; bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta

experiencing a national disaster, extraordinary events and / or solvency crisis; tax share from provincial and other local governments; contingency funds / balancing / adjustment from government; financial assistance from provincial and other local governments, and other legal income.

Local Government Expenditure

Local Government Expenditure

consists of:

1. *Indirect Expenditure*
2. *Direct Expenditure*

Indirect Expenditure is part of personnel expenditure, interest expenditure, subsidies expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, sharing fund expenditure, financial assistance expenditure and unpredicted expenditure. Those items are not directly related to the implementation of programs and activities.

Indirect Personnel Expenditure is a compensation in the form of salaries and benefits, and other income provided

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan / lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

to civil servants based on legislation. Include here are representations and benefits for head and the members of parliament, salaries and benefits of regional head and deputy head of the region, as well as other income that stipulated under law budgeted.

Interest Expenditure is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term and long term agreement.

Subsidies Expenditure is expenditure that has been budgeted and used to support the cost of production to the certain company / organisation, so that the selling price of the goods / services produced can be affordable. The intended company / agency must be providing products or services for public / society needs.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah / BUMN / BUMD, badan / lembaga / organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat / perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Grant Expenditures is expenditure that has been setting out to give to others as a grant, both in form of money, goods and or services. The grants can be given to the central government, other local governments, village government, regional corporate / state/ enterprises, agencies/ institutions / organizations, or community groups / individuals.

Social Assistance Expenditure is expenditure that has been budgeted to provide assistance to civil society organizations, political parties and others with the aim to improve the welfare of the community.

Social Assistance to Community Organizations is the provision of assistance to community organizations for social purposes. This assistance done selectively and it has clarity in its use.

Social Assistance to Political Party is the provision of assistance to the political parties that is budgeted under law as social assistance.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten / kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan

Sharing Fund Expenditure to Provincial / District / City and Village Government is expenditure that has been budgeted as sharing fund which is derived from provincial revenue, and given to district / city, village, or a particular local government revenues that is given to other local governments in accordance with law.

This expenditure consists of:

- *Tax shares expenditure to the provincial government*
- *Local tax shares expenditure to the district / city*
- *Local tax shares expenditure to the village government*
- *Local retribution shares to the district / city*
- *Local retribution shares to village government*

Financial Assistance Expenditure to Provincial / District / City and Village Government is a general or specific assistance from the provincial government to the district / city, village government, or other local governments for the purpose of equalizing and increasing the financial capability.

kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

General financial assistance is the assistance from the local government where the use and the management of fund delivered is done by the recipient government. Specific financial assistance is the assistance, where the used and the management of fund is done directed by the donor government.

Financial Assistance consists of:

- *Financial assistance to the provincial government*
- *Financial assistance to district / city government*
- *Financial assistance to the village government*
- *Financial assistance to local governments / other village governments*

Unpredicted Expenditure is expenses used for the activities that are unusual or unexpected such as natural disaster and social disaster, including refund of the excess revenue from previous years.

Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan

***Direct Expenditure** is a part of personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditures, that are budgeted directly related to the implementation of programs and activities.*

***Direct Personnel Expenditure** is expenses used for honorarium / wages, overtime and other expenses to increase employee motivation and quality in implementing government programs and activities.*

***Goods and Services Expenditure** is expenses used for purchasing / procurement of goods that worth less than a year (non durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government.*

Purchasing / procurement of the goods and services among other are for non durable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, wearpack, official journey, travel duty, returning officers and other goods and services.

pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan

Capital Expenditure is expenses used for purchasing / procurement of a tangible fixed asset that worth more than a year (durable goods).

The establishment of these assets include provision of land, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural tools, equipment and office supplies, computers, mebeulair, kitchen appliances, room interior design, studio equipment, communication tools, measuring tools, medical equipment, laboratory equipment, construction of roads, bridges, water installations, street lighting, parking area and urban forests, electric and telephone installations, buildings, books/literature, arts, animal procurement / livestock and plants, as well as weapons / security.

Local Government Financing is any revenue that needs to be paid back and / or expenditures that will be readmitted, both in the current fiscal year and in the next fiscal years. Net financing is the difference between financing receipt and financing expenditure.

dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah ;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dari dana cadangan
 - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan daerah ;
 - a. Transfer ke dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

Total net financing should be able to cover the budget deficit on the other way around budget surplus would be allocated to finance expenses, whether for payment of principal, as well as for investment or the creation of a reserved fund.

Local government financing consists of:

- 1. Local government financing receipt;*
 - a. Last fiscal year budget surplus*
 - b. Transfer from reserved fund*
 - c. Receipt form loans and bonds*
 - d. Income of separated selling assets*
- 2. Local government financing expenditures;*
 - a. Transfer to reserved fund*
 - b. Equity*
 - c. Principal payment of debt*
 - d. Current fiscal year budget surplus*

Last Fiscal Year Budget Surplus is *last fiscal year surplus / deficit plus the financing receipt less financing expenditure.*

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya

***Reserved Fund Disbursement** is revenue derived from the disbursement of the reserve fund, i.e from reserved fund account to general cash account along the current fiscal year.*

***Income of Separated Property Sales Results** is the selling of government assets through third parties, or the income of local government divestment of equity.*

***Local Government Revenue from Loan** is revenue from the loans, including the issuance of local bonds that will be issued in the current fiscal year.*

***Revenue from Lending** is all revenue obtained from lending to the central government and / or to other local governments.*

***Establishment of Reserved Fund** is expenditure to establish a reserved fund to finance activities that the provision of funds can not fully implemented in one fiscal year.*

tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Equity (Investment) of Local Government is government expenses that allocated to equity / investment, both in the short and long term, permanent or non-permanent. This investment can be in the form of deposit, the purchase of government securities (GS), Bank Indonesia Certificates (SBI), Treasury Bills (SPN), shares, investment in state / public enterprises, purchase of bonds and long-term debt.

Payment of Principal Debt is the payment of the principal debt which is calculated based on the short, medium and long term agreement.

Regional Lending is government spending in the form of lending to the central government, local government, and / or third parties.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Current Fiscal Year Budget Surplus
is a surplus / deficit plus the financing receipt less financing expenditure.

<http://www.bps.go.id>

II. URAIAN RINGKAS

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

II. BRIEF DESCRIPTION

GENERAL

Regional development is essentially an effort to create the government with reliable and professional capabilities. As an integral part of national development which aims to improve the living standar and welfare of the people, development in the local government, both at the provincial level and district / city level must be carried out effectively and efficiently. Thereby, the regional independency and equality of development will be achieved.

The issue of financial independence becomes very important, particularly the ones that relate to regional financial contribution to regional economic growth. The contribution of local government expenditure on regional economic growth is an opportunity that should be utilized optimally to stimulate the local economy.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Dealing with the matter, the provincial government formulate the Receipt and Expenditure budget (APBD) Province as a form of regional development planning. In the APBD, the details of programs that will be implemented along with funding sources were recorded. Budgeting should be arranged in such a way, so it can improve the performance of regional government and public service oriented.

The sources of funds for financing the regional development should be come from the region's own financial ability, with the aim to accelerate the government independency. In other words the local government must be spured to increase the capability in financing the organization and public services by utilized their own potensial fund.

II.1. Pendapatan Daerah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 98.900 miliar rupiah pada tahun 2009, menjadi 116.802 miliar rupiah pada tahun 2010 dan 140.001 miliar rupiah pada tahun 2011 atau mengalami pertumbuhan masing-masing 18,10 persen dan 19,86 persen. Pada tahun 2012 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 18,54 persen menjadi 165.962 miliar rupiah. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan asli daerah terutama komponen pajak daerah, dan juga yang berasal dari dana perimbangan, Upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi dalam meningkatkan pendapatan daerah sejak beberapa tahun yang lalu baru menampakkan hasil yang signifikan pada tahun 2011, terutama pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil

II.1. Revenue

Table A shows that the realization of the Provincial government's total receipt in Indonesia during 2009-2011 keep increasing, with the total revenue of 98,900 billion rupiahs in 2009, 116,802 billion rupiahs in 2010 and 140,001 billion rupiahs in 2011, or increased about 18.10 percent, and 19.86 percent. In 2012, the receipt of provincial government is targeted to increase by 18.54 percent to 165,962 billion rupiahs. The increasing mostly caused by the original government revenues, especially tax component, and also derived from the balanced budget. The efforts that have been made to increase revenue of the provincial government since few years ago, has revealed significant results in 2011, particularly in the provinces of Jakarta, West Java, East Java and North Sumatra.

The Original Local Government Revenue (PAD) is one of the important sources of income for the region. The local government that has capability to

Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah)/Actual Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt (Billion Rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pendapatan	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	45 406	56 727	73 620	75 071
a.	Pajak Daerah	37 668	47 301	62 759	64 213
b.	Retribusi Daerah	1 572	1 455	1 409	1 309
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 608	1 933	2 524	2 713
d.	Lain-lain PAD yang Sah	4 558	6 038	6 928	6 836
2.	Dana Perimbangan	42 598	47 520	52 780	55 062
a.	Bagi Hasil Pajak	15 410	17 557	16 448	16 478
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 178	9 896	12 509	10 196
c.	Dana Alokasi Umum	18 650	19 247	22 553	27 052
d.	Dana Alokasi Khusus	1 360	820	1 270	1 336
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10 895	12 556	13 601	35 830
JUMLAH/TOTAL		98 900	116 802	140 001	165 962

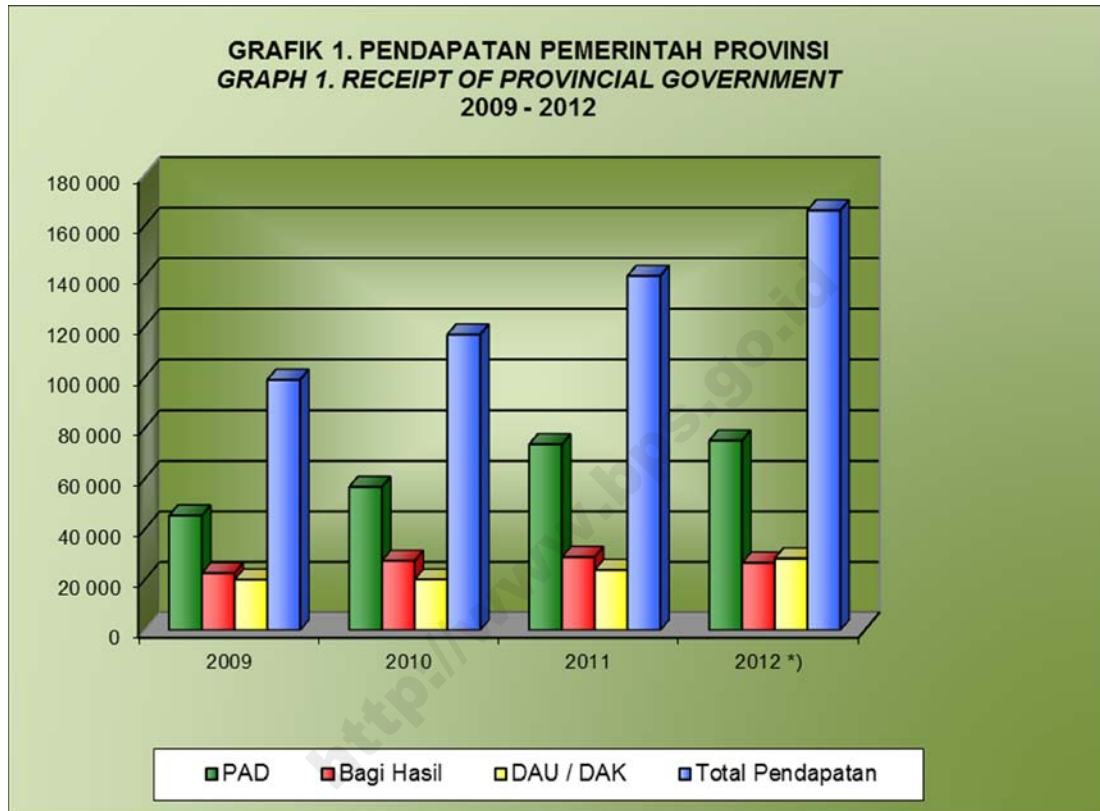
*) Data APBD

meningkatkan PAD-nya secara nyata, berarti daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Selama periode tahun 2009-2011, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 45.406 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi masing-masing sebesar 56.727 miliar rupiah dan 73.620 miliar rupiah pada tahun 2010 dan 2011. Peningkatan ini didukung oleh penerimaan pajak daerah. Peran kedua terbesar setelah pajak daerah yaitu dari lain-lain PAD yang sah, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang

increase its PAD significantly, meaning that this region has been able to utilized the existing potential optimally. During the period 2009-2011, the development of PAD was steady increasing, i.e, from 45,406 billion rupiah in 2009 to 56,727 billion rupiahs and 73,620 billion rupiahs in 2010 and 2011 respectively. This increasing was supported by local tax revenue. The second biggest contribution was from other legal PAD, followed by management of separated local government wealth and retributions.

dipisahkan, dan retribusi daerah. Pada tahun 2012, PAD ditargetkan naik menjadi 75,071 miliar rupiah, dimana penerimaan pajak ditargetkan tetap meningkat walaupun tidak terlalu tinggi.

In 2012, PAD is targeted to increase to 75,071 billion rupiahs, where the income from tax is still targeted to increase but not too high as before.



PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah **“rendah sekali”**, dapat

*PAD is an important component in measuring the financial independence of a local government. The greater the role of PAD in the budget, the more independence is the local. If the level of independence of a region is **“very low”**, it can be said that the*

dikatakan bahwa pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “**rendah**”, campur tangan pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “**sedang**”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “**tinggi**”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

central government has the dominant role than the local government itself. Meanwhile, if a region has a degree of independence “low”, it means that the central government intervention has been decreasing, because the region is considered to be a little more able to implement regional autonomy. Next, for the government with “medium” category, it means that the region have been able to implement regional autonomy, while the category of “high”, it could mean that the local government has capable and independent in carrying out the affairs of local autonomy.

Tabel B. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian
The Distribution of Province in Indonesia by Rate Independence Category
2009 - 2012

Kategori Kemandirian	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rendah Sekali (0-25 %)	9	7	7	8
Rendah (>25-50 %)	15	14	14	15
Sedang (>50-75 %)	9	12	9	9
Tinggi (>75%)	0	0	3	1
Jumlah	33	33	33	33

*) APBD

Kontribusi PAD pada tahun 2009 dan 2010 masih pada kisaran 40 sampai dengan 50 persen, sehingga secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut masih dikategorikan rendah. Namun demikian pada tahun 2011 tingkat kemandirian daerah sudah masuk dalam kategori sedang, yaitu berkisar 52,59 persen. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi semakin mandiri. Sedangkan pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi sangat berhati-hati dalam menargetkan anggaran PAD-nya, karena khawatir tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi PAD terhadap total pendapatannya kembali menurun.

Selain dari PAD, sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah tetapi dikelola oleh pemerintah pusat adalah beberapa komponen pajak dan beberapa sumber daya alam, yang sebagian pendapatannya dikembalikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pendapatan kedua jenis bagi hasil tersebut tercatat sebesar 22.588 miliar rupiah pada tahun 2009, naik menjadi 27.453 miliar rupiah

PAD contribution to total revenue in 2009 and 2010 was in the range of 40 to 50 percent. Thus on the average, the level of independence of the provinces in Indonesia for the years was still considered as low. However in 2011 the independence level is medium, i.e 52.59 percent. It is an indicator that in general, the provincial government became more independence. In 2012 the Provincial Government was very careful in targeting PAD, for the reason of fearness that they could not meet the target. Therefore the portion of PAD to total revenue showed decreasing.

Other than PAD, local government has another fund sources that come from local resources, but managed by central government. Those are some components of taxes, and few natural resources, where some part of their revenue were returned to the local government in kind of tax shares and natural resources share. Revenue from these shares was amounted to 22,588 billion rupiahs in 2009, increase to 27,453 billion

pada tahun 2010 lalu meningkat menjadi 28.957 miliar rupiah pada tahun 2011. Sedangkan anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam pada tahun 2012 tidak begitu optimis dengan menetapkan anggaran sebesar 26.674 miliar rupiah.

rupiahs in 2010 then reach 28,957 billion rupiahs in 2011. Meanwhile the shares budget for 2012 was not so optimistic, it was only 26,674 billion rupiahs in target.

Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (persen) / *Receipt Contribution of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Receipt (percent), 2009 - 2012*

No.	Jenis Pendapatan	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	45.91	48.57	52.59	45.23
a.	Pajak Daerah	38.09	40.50	44.83	38.69
b.	Retribusi Daerah	1.59	1.25	1.01	0.79
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.63	1.65	1.80	1.63
d.	Lain-lain PAD yang Sah	4.61	5.17	4.95	4.12
2.	Dana Perimbangan	43.07	40.68	37.70	33.18
a.	Bagi Hasil Pajak	15.58	15.03	11.75	9.93
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.26	8.47	8.93	6.14
c.	Dana Alokasi Umum	18.86	16.48	16.11	16.30
d.	Dana Alokasi Khusus	1.38	0.70	0.91	0.81
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	11.02	10.75	9.71	21.59
JUMLAH/ TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00

*) Data APBD

Selanjutnya, pada tabel C dapat dilihat bahwa mulai tahun 2009 persentase pendapatan yang berasal dari PAD cenderung meningkat dibandingkan dengan pendapatan

Moreover, from Table C, it can be seen that the percentage of revenue derived from the PAD tends to increase compared to the revenue derived from the balanced budget. On the other side,

daerah yang berasal dari dana perimbangan. Disisi lain jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat, menandakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah Pusat hanya kurang dari 20 persen.

Pada kurun waktu 2009-2011, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, masing-masing sebesar 45,91 persen, 48,57 persen dan 52,59 persen. Sementara itu pada tahun 2012 pemerintah daerah menargetkan bahwa kontribusi PAD sebesar 45,23 persen. Dari sumber penerimaan yang dikategorikan kedalam PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang paling dominan. Besarnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2009-2011 adalah 38,09 persen, 40,50 persen dan 44,83 persen terhadap total pendapatan.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan menurun dengan kontribusi sebesar 43,07 persen, 40,68 persen dan 37,70 persen terhadap total pendapatan pada tahun 2009-2011. Pada tahun 2012 dana perimbangan

if viewed from the DAU and DAK given by central government, the dependency level of local governments is less than 20 percent.

During 2009-2011, the contribution of PAD to total revenue were 45.91 percent, 48.57 percent and 52.59 percent respectively. Whereas, in 2012 the local government allocates that PAD contribution amounting to 45.23 percent. The component of PAD that gave dominant contribution was local taxes. In 2009-2011, the contribution of local taxes to total revenue were 38.09 percent, 40.50 percent and 44.83 percent.

Revenue derived from the balanced budget has a tendency to decrease with a contribution of 43.07 percent, 40.68 percent and 37.70 percent to total revenue during the period of 2009-2011, In 2012 the balanced budget was set up to have contribution of 33.18 percent. The balanced budget consists of two parts, namely the revenue from tax shares

telah dianggarkan sehingga memiliki kontribusi 33,18 persen terhadap total pendapatan. Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Satu bagian yang lain adalah dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan ini berasal dari dana alokasi umum, diikuti oleh bagi hasil pajak. Sedangkan dana alokasi khusus porsinya sangat kecil, karena memang diberikan untuk kegiatan / kejadian khusus saja.

Selanjutnya adalah lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah yang paling kecil kontribusinya terhadap total pendapatan dibandingkan PAD dan dana perimbangan. Pada tahun 2009 kontribusi komponen ini hanya sebesar 11,02 persen sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 10,75 persen dan 9,71 persen. Sementara itu pada tahun 2012, lain-lain pendapatan yang sah tumbuh cukup signifikan yaitu 21,59 persen.

and natural resource shares. The other part is the allocation of funds which include the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) that come from central government fund transfers. The highest contribution of the balanced budget was from General Allocation Fund (DAU) components, followed by tax shares. Meanwhile, for Special Allocation Fund (DAK), the share was very low, because it is only given to the special / certain activities of local government.

Then, the other component of local government receipt, is other legal revenue that has the smallest contribution to total revenue, compared to PAD and balanced budget. In 2009 its contribution amounted to only 11.02 percent, while in 2010 and 2011 it was 10.75 percent and 9.71 percent respectively. And in 2012, it was targeted to grow significantly, i.e 21.59 percent.

II.3. Belanja Daerah

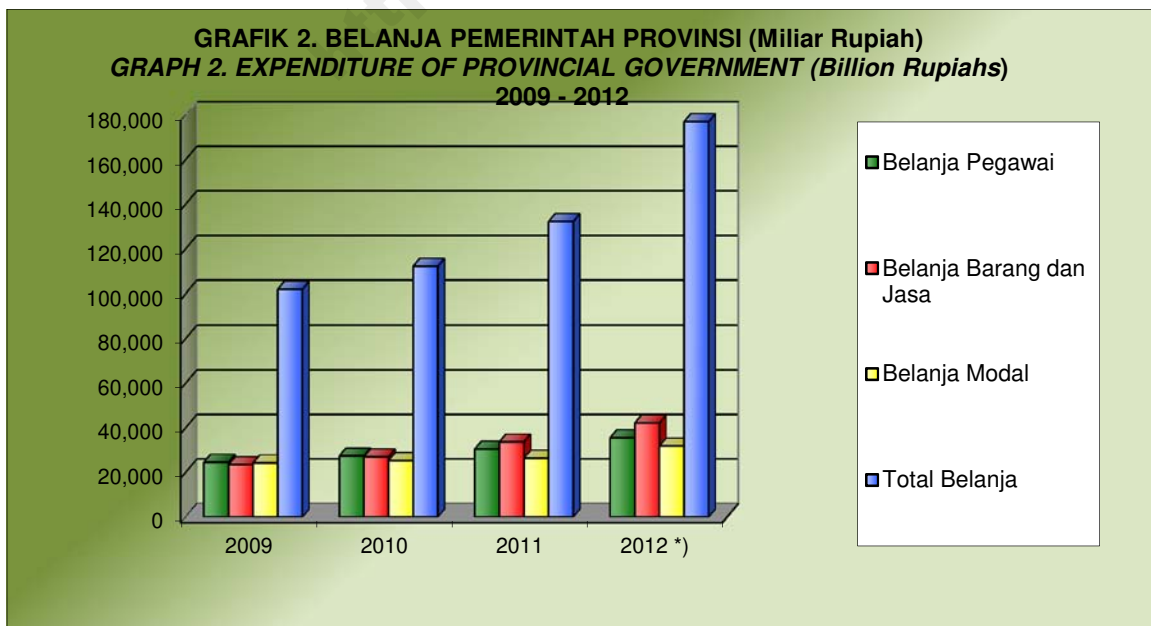
Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2009-2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 101.884 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 112.153 miliar rupiah tahun 2010 dan 132.217 miliar rupiah pada tahun 2011. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatannya yang disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.

Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2009 terjadi defisit anggaran,

II.3. Local Government Expenditure

In general, local government expenditures during 2009-2011 experienced an increase every year, that was, 101,884 billion rupiahs in 2009 to 112,153 billion rupiahs in 2010 and 132,217 billion rupiahs in 2011. This is in line with the increase in revenue. This increase was due to the increase in almost all types of expenditure, both indirect expenditure and direct expenditure.

In terms of the realization of receipt and expenditure, the budget deficit occurred in 2009, especially for regions that has big financing such as



terutama untuk wilayah yang memiliki pembiayaan yang besar seperti Kalimantan Timur dan Riau. Namun defisit ini masih dapat diatasi dengan menggunakan dana pendapatan pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011, secara umum provinsi memperoleh surplus. Pada tahun anggaran 2012 diperkirakan belanja daerah sebesar 176.995 miliar rupiah, dan diperkirakan mengalami defisit sehingga harus menggunakan pendapatan pembiayaan untuk menutup kekurangannya. Secara rinci realisasi belanja pemerintah disajikan pada Tabel D.

East Kalimantan and Riau. However, this deficit can be overcome by using financing receipt. Whereas in 2010 and 2011, generally the provinces have the surplus budget. In fiscal year 2012, the local expenditures was targeted at 176,995 billion rupiahs, and deficit was predicted occurred this year so it must use the financing receipt to cover the deficit. In details, the actual expenditure of local government in Table D.

Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (Miliar Rupiah) / Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (Billion Rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Belanja	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	48 150	53 152	66 590	96 517
1.	Belanja Pegawai	18 452	20 693	24 826	29 026
2.	Belanja Bunga	11	9	15	41
3.	Belanja Subsidi	116	65	40	56
4.	Belanja Hibah	2 950	4 428	7 369	29 728
5.	Belanja Bantuan Sosial	4 264	3 627	4 008	1 830
6.	Belanja Bagi Hasil	11 977	13 628	17 301	18 523
7.	Belanja Bantuan Keuangan	10 183	10 552	12 842	16 422
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	197	150	191	892
B.	BELANJA LANGSUNG	53 734	59 001	65 627	80 438
1.	Belanja Pegawai	6 075	6 670	5 638	6 511
2.	Belanja Barang dan Jasa	23 412	26 992	33 657	42 093
3.	Belanja Modal	24 247	25 339	26 333	31 835
JUMLAH/TOTAL		101 884	112 153	132 217	176 955

*) Data APBD

Dilihat dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai, dalam hal ini gabungan dari belanja pegawai langsung, dan tidak langsung. Pada tahun 2009 belanja pegawai tercatat sebesar 24.527 miliar rupiah atau 24,07 persen terhadap total belanja, dan tahun 2010 sebesar 27.363 miliar rupiah (24,40 persen). Namun pada tahun 2011, komponen belanja terbesar adalah belanja barang dan jasa (komponen belanja langsung), karena belanja pegawai pada tahun tersebut hanya 30.464 miliar rupiah lebih rendah dibanding belanja barang dan jasa sebesar 33.657 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 belanja pegawai diperkirakan terus meningkat sebesar 16,65 persen dibanding tahun 2011.

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja barang dan jasa. Pada tahun 2009-2011, belanja tersebut tercatat sebesar 23.412 miliar rupiah, 26.992 miliar rupiah dan 33.657 miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 15,29 persen di tahun 2010, dan 24,69 persen

Based on the expenditure structure, it can be seen that the dominant component of the expenditure was personnel expenditure. In this case both the indirect and direct personnel expenditure. In 2009, personnel expenditure was amounted to 24,527 billion rupiahs or 24.07 percent to total expenditure, and in 2010 it was 27,363 billion rupiahs (24.40 percent). But, in 2011, this component was replaced by goods and services expenditure (component of direct expenditure), which was 33,657 billion rupiahs, while the personnel expenditure only 30,464 billion rupiahs. Then, in 2012, personnel expenditure keep increasing as much as 16.65 percent compared to 2011.

The next dominant component of expenditure was goods and services expenditure. During the year of 2009-2011, this expenditure recorded as much as 23,412 billion rupiahs, 26,992 billion rupiahs and 33,657 billion rupiahs or increased by 15.29 percent in 2010, and 24.69 percent in 2011.

Tabel E. Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (persen) / *Contribution of Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure (percent), 2009-2012*

No.	Jenis Belanja	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.26	47.39	50.36	54.54
1.	Belanja Pegawai	18.11	18.45	18.78	16.40
2.	Belanja Bunga	0.01	0.01	0.01	0.02
3.	Belanja Subsidi	0.11	0.06	0.03	0.03
4.	Belanja Hibah	2.90	3.95	5.57	16.80
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.19	3.23	3.03	1.03
6.	Belanja Bagi Hasil	11.76	12.15	13.09	10.47
7.	Belanja Bantuan Keuangan	9.99	9.41	9.71	9.28
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0.19	0.13	0.14	0.50
B.	BELANJA LANGSUNG	52.74	52.61	49.64	45.46
1.	Belanja Pegawai	5.96	5.95	4.26	3.68
2.	Belanja Barang dan Jasa	22.98	24.07	25.46	23.79
3.	Belanja Modal	23.80	22.59	19.92	17.99
JUMLAH/TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00

*) Data APBD

pada tahun 2011. Pada tahun 2012 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 42.093 miliar rupiah atau 25,06 persen lebih tinggi dari realisasi 2011. Belanja modal juga memiliki nilai yang cukup besar yaitu 24.247 miliar rupiah pada tahun 2009, 25.339 miliar rupiah pada tahun 2010, dan 26.333 miliar rupiah pada tahun 2011. Pada tahun 2012 belanja modal dianggarkan sebesar 31.835 miliar rupiah.

In 2012 spending on goods services are budgeted at 42,093 billion rupiahs or 25.06 percent higher than the realization of 2011. Capital expenditures also have considerable value, namely 24,247 billion rupiahs in 2009, 25,339 billion rupiahs in 2010, and 26,333 billion rupiahs in 2011. In 2012, it was budgeted as much as 31,835 billion rupiahs.

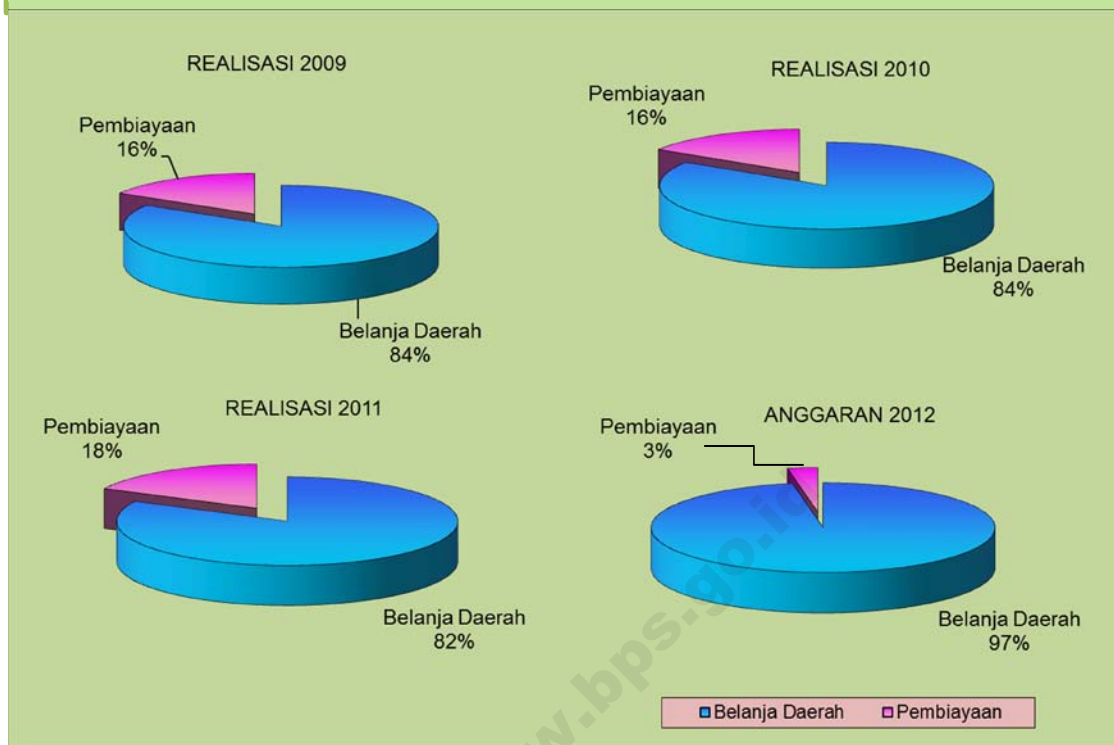
Selanjutnya, bila dilihat dari struktur belanja langsung dan tidak langsung terlihat bahwa belanja langsung lebih besar dibanding tidak langsung pada tahun 2009 dan 2010. Sebaliknya pada tahun 2011, belanja tidak langsung persentasenya lebih besar. Dalam belanja tidak langsung, komponen yang cukup dominan adalah belanja pegawai dan belanja bagi hasil. Kontribusi kedua jenis belanja ini pada tahun 2011 adalah 18,78 persen dan 13,09 persen terhadap total belanja. Sementara itu, pada belanja langsung, komponen yang cukup besar adalah belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kontribusi keduanya adalah sekitar 46 persen terhadap total belanja.

Penyerapan anggaran daerah yang merupakan persentase realisasi belanja terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2009-2011. Pada tahun 2009 penyerapan anggaran mencapai 83,59 persen, meningkat menjadi 84,03 persen pada tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 penyerapan anggaran mengalami penurunan, yaitu hanya 82,38 persen. Sedangkan target penyerapan anggaran pada tahun 2012 adalah 97,16 persen (grafik 3).

Then, if viewed based on direct and indirect expenditure, it can be seen that the portion of direct expenditure was higher than indirect expenditure in 2009 and 2010. On the other way, in 2011, the portion of indirect expenditure was higher. The components of indirect expenditure that significantly high were personnel expenditure and sharing fund expenditure. The contributions of these kind of expenditure in 2011 was 18.78 percent and 13.09 percent to total expenditure respectively. Meanwhile, in direct expenditure structure, the item with highest portion were goods and services expenditure and capital expenditure. The contribution of both expenditure were around 46 percent to total expenditure.

The absorption of local budget, which is represented by the percentage of actual expenditure to total receipt, experienced a fluctuation during 2009-2011. In 2009, it was recorded as much as 83.59 percent, increase to 84.03 percent in 2010. But, in 2011, it experienced a little decrease, that was 82.38 percent. Meanwhile, the target of budget absorption in 2012 was 97.16 percent (graph 3).

GRAFIK 3. PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI
GRAPH 3. BUDGET ABSORPTION OF PROVINCIAL GOVERNMENT
2009 – 2012



TABEL

TABLE 1.

<http://www.bps.go.id>

TABEL 1.a REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2009
TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	6 042 467 779	4 015 380 289	10 057 848 068	7 642 847 005	2 415 001 063	10 057 848 068
2.	Sumatera Utara	3 212 558 700	610 590 952	3 823 149 652	3 444 560 582	378 589 070	3 823 149 652
3.	Sumatera Barat	2 026 241 165	314 029 282	2 340 270 447	1 657 403 919	682 866 528	2 340 270 447
4.	R i a u	3 231 912 094	871 076 872	4 102 988 966	3 757 480 844	345 508 122	4 102 988 966
5.	J a m b i	1 353 900 464	386 301 605	1 740 202 069	1 530 073 192	210 128 877	1 740 202 069
6.	Sumatera Selatan	2 397 685 724	288 684 451	2 686 370 175	2 341 327 091	345 043 084	2 686 370 175
7.	Bengkulu	914 357 986	218 702 463	1 133 060 449	932 490 304	200 570 145	1 133 060 449
8.	Lampung	1 742 386 840	183 672 386	1 926 059 226	1 847 107 848	78 951 378	1 926 059 226
9.	Bangka Belitung	804 845 143	315 545 870	1 120 391 013	854 254 243	266 136 770	1 120 391 013
10.	Kepulauan Riau	1 459 000 000	391 953 213	1 850 953 213	1 848 353 213	2 600 000	1 850 953 213
11.	DKI Jakarta	19 251 893 888	4 446 373 058	23 698 266 946	19 500 311 731	4 197 955 215	23 698 266 946
12.	Jawa Barat	7 785 889 984	2 457 196 766	10 243 086 750	8 193 613 910	2 049 472 840	10 243 086 750
13.	Jawa Tengah	5 696 660 052	683 817 617	6 380 477 669	5 200 113 113	1 180 364 556	6 380 477 669
14.	D I Yogyakarta	1 286 067 485	285 824 679	1 571 892 164	1 327 487 848	244 404 316	1 571 892 164
15.	Jawa Timur	7 827 694 815	2 061 246 529	9 888 941 344	7 602 038 808	2 286 902 536	9 888 941 344
16.	Banten	2 436 096 122	237 720 327	2 673 816 449	2 420 820 941	252 995 508	2 673 816 449
17.	B a l i	1 902 227 543	468 108 450	2 370 335 993	1 811 099 336	559 236 657	2 370 335 993
18.	Nusa Tenggara Barat	1 173 506 085	63 928 652	1 237 434 737	1 100 537 892	136 896 845	1 237 434 737
19.	Nusa Tenggara Timur	1 023 505 681	268 175 864	1 291 681 545	1 025 445 818	266 235 727	1 291 681 545
20.	Kalimantan Barat	1 577 890 709	222 153 924	1 800 044 633	1 627 012 304	173 032 329	1 800 044 633
21.	Kalimantan Tengah	1 367 412 136	145 923 582	1 513 335 718	1 471 278 248	42 057 470	1 513 335 718
22.	Kalimantan Selatan	2 109 410 863	549 419 700	2 658 830 563	2 105 293 055	553 537 508	2 658 830 563
23.	Kalimantan Timur	5 348 926 268	2 007 208 728	7 356 134 996	6 309 258 861	1 046 876 135	7 356 134 996
24.	Sulawesi Utara	1 023 349 288	399 104 168	1 422 453 456	1 034 427 882	388 025 574	1 422 453 456
25.	Sulawesi Tengah	1 052 332 635	189 511 577	1 241 844 212	1 059 732 420	182 111 792	1 241 844 212
26.	Sulawesi Selatan	2 175 750 141	183 706 090	2 359 456 231	2 122 191 791	237 264 440	2 359 456 231
27.	Sulawesi Tenggara	1 030 720 131	124 465 203	1 155 185 334	1 119 700 385	35 484 949	1 155 185 334
28.	Gorontalo	561 186 326	123 276 331	684 462 657	619 327 894	65 134 763	684 462 657
29.	Sulawesi Barat	554 240 280	59 884 225	614 124 505	590 163 812	23 960 693	614 124 505
30.	M a l u k u	1 008 730 045	64 679 783	1 073 409 828	1 015 807 645	57 602 183	1 073 409 828
31.	Maluku Utara	685 771 448	81 106 646	766 878 094	759 516 144	7 361 950	766 878 094
32.	Papua Barat	2 822 594 303	49 003 746	2 871 598 049	2 719 348 870	152 249 179	2 871 598 049
33.	P a p u a	6 012 822 338	225 000 000	6 237 822 338	5 294 198 938	943 623 400	6 237 822 338
JUMLAH/TOTAL		98 900 034 461	22 992 773 028	121 892 807 489	101 884 625 887	20 008 181 602	121 892 807 489

TABEL 1.b REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010
TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	6 967 815 083	1 842 988 678	8 810 803 761	7 528 516 368	1 282 287 393	8 810 803 761
2.	Sumatera Utara	3 885 636 140	346 533 462	4 232 169 602	3 666 706 174	565 463 428	4 232 169 602
3.	Sumatera Barat	1 920 971 383	673 887 321	2 594 858 704	2 239 753 492	355 105 212	2 594 858 704
4.	R i a u	4 346 845 188	114 587 470	4 461 432 658	4 267 432 658	194 000 000	4 461 432 658
5.	J a m b i	1 640 185 858	201 204 877	1 841 390 735	1 488 130 350	353 260 385	1 841 390 735
6.	Sumatera Selatan	3 224 159 595	315 250 644	3 539 410 239	3 108 036 632	431 373 607	3 539 410 239
7.	Bengkulu	1 000 860 633	10 570 146	1 011 430 779	971 198 561	40 232 218	1 011 430 779
8.	Lampung	2 091 684 131	79 029 066	2 170 713 197	2 004 899 187	165 814 010	2 170 713 197
9.	Bangka Belitung	848 025 113	264 129 736	1 112 154 849	862 715 774	249 439 075	1 112 154 849
10.	Kepulauan Riau	1 853 589 773	242 173 799	2 095 763 572	1 723 574 713	372 188 859	2 095 763 572
11.	DKI Jakarta	23 025 986 993	3 748 512 147	26 774 499 140	21 552 895 839	5 221 603 301	26 774 499 140
12.	Jawa Barat	9 742 187 781	1 789 756 684	11 531 944 465	9 020 608 021	2 511 336 444	11 531 944 465
13.	Jawa Tengah	6 626 316 989	904 356 288	7 530 673 277	5 968 033 770	1 562 639 507	7 530 673 277
14.	D I Yogyakarta	1 374 205 096	256 568 355	1 630 773 451	1 354 594 058	276 179 393	1 630 773 451
15.	Jawa Timur	9 980 544 750	1 995 753 452	11 976 298 202	10 206 317 103	1 769 981 099	11 976 298 202
16.	Banten	3 139 437 626	235 495 508	3 374 933 134	2 834 570 528	540 362 606	3 374 933 134
17.	B a l i	2 237 707 339	538 452 871	2 776 160 210	1 985 850 057	790 310 153	2 776 160 210
18.	Nusa Tenggara Barat	1 272 218 059	73 514 841	1 345 732 900	1 275 746 585	69 986 315	1 345 732 900
19.	Nusa Tenggara Timur	1 088 071 459	224 112 521	1 312 183 980	1 148 082 390	164 101 590	1 312 183 980
20.	Kalimantan Barat	1 778 927 314	173 009 098	1 951 936 412	1 700 202 329	251 734 083	1 951 936 412
21.	Kalimantan Tengah	1 555 426 286	57 885 383	1 613 311 669	1 477 348 175	135 963 494	1 613 311 669
22.	Kalimantan Selatan	2 279 776 309	492 660 308	2 772 436 617	2 410 095 344	362 341 273	2 772 436 617
23.	Kalimantan Timur	7 044 556 875	808 568 904	7 853 125 779	5 918 568 095	1 934 557 684	7 853 125 779
24.	Sulawesi Utara	1 158 671 349	347 025 574	1 505 696 923	1 137 423 445	368 273 478	1 505 696 923
25.	Sulawesi Tengah	1 177 609 898	177 052 220	1 354 662 118	1 127 256 721	227 405 397	1 354 662 118
26.	Sulawesi Selatan	2 564 075 935	230 448 199	2 794 524 134	2 486 159 765	308 364 369	2 794 524 134
27.	Sulawesi Tenggara	1 055 173 630	106 197 607	1 161 371 237	1 125 687 951	35 683 286	1 161 371 237
28.	Gorontalo	593 415 093	65 070 534	658 485 627	567 080 442	91 405 185	658 485 627
29.	Sulawesi Barat	610 378 110	23 221 030	633 599 140	607 672 166	25 926 974	633 599 140
30.	M a l u k u	952 660 802	58 385 591	1 011 046 393	950 281 175	60 765 218	1 011 046 393
31.	Maluku Utara	695 828 538	2 872 955	698 701 493	682 723 184	15 978 309	698 701 493
32.	Papua Barat	3 407 802 988	129 160 000	3 536 962 988	3 104 771 915	432 191 073	3 536 962 988
33.	P a p u a	5 661 736 549	142 102 552	5 803 839 101	5 650 474 892	153 364 209	5 803 839 101
JUMLAH/TOTAL		116 802 488 665	16 670 537 821	133 473 026 486	112 153 407 859	21 319 618 627	133 473 026 486

TABEL 1.c REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011
TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Aceh		7 610 320 146	1 306 726 214	8 917 046 360	7 374 625 288	1 542 421 072	8 917 046 360
2. Sumatera Utara		4 958 481 902	404 884 723	5 363 366 625	4 611 477 163	751 889 462	5 363 366 625
3. Sumatera Barat		2 071 161 196	335 221 212	2 406 382 408	2 328 765 074	77 617 334	2 406 382 408
4. Riau		5 440 440 485	421 520 453	5 861 960 938	4 265 129 661	1 596 831 277	5 861 960 938
5. Jambi		2 078 806 913	353 260 385	2 432 067 298	1 750 241 856	681 825 442	2 432 067 298
6. Sumatera Selatan		3 963 984 966	390 314 822	4 354 299 788	3 806 079 835	548 219 953	4 354 299 788
7. Bengkulu		1 166 982 246	39 678 718	1 206 660 964	1 009 215 053	197 445 911	1 206 660 964
8. Lampung		2 527 990 902	161 181 629	2 689 172 531	2 566 078 806	123 093 725	2 689 172 531
9. Bangka Belitung		1 193 497 245	240 432 353	1 433 929 598	1 176 683 816	257 245 782	1 433 929 598
10. Kepulauan Riau		1 876 879 092	375 005 362	2 251 884 454	1 947 593 445	304 291 009	2 251 884 454
11. DKI Jakarta		28 297 361 175	4 926 078 266	33 223 439 441	26 423 682 189	6 799 757 252	33 223 439 441
12. Jawa Barat		11 053 859 588	2 449 742 872	13 503 602 460	10 295 569 845	3 208 032 615	13 503 602 460
13. Jawa Tengah		7 547 669 804	1 239 075 792	8 786 745 596	7 776 705 827	1 010 039 769	8 786 745 596
14. D I Yogyakarta		1 604 910 831	254 231 964	1 859 142 795	1 294 221 395	564 921 400	1 859 142 795
15. Jawa Timur		11 493 375 583	1 564 783 382	13 058 158 965	11 685 920 672	1 372 238 293	13 058 158 965
16. Banten		3 755 614 332	535 848 290	4 291 462 622	3 901 218 115	390 244 507	4 291 462 622
17. Bali		2 662 077 116	704 385 153	3 366 462 269	2 564 801 495	801 660 774	3 366 462 269
18. Nusa Tenggara Barat		1 689 351 249	17 280 030	1 706 631 279	1 650 601 275	56 030 004	1 706 631 279
19. Nusa Tenggara Timur		1 324 470 172	120 234 844	1 444 705 016	1 231 882 713	212 822 303	1 444 705 016
20. Kalimantan Barat		2 202 217 037	231 734 083	2 433 951 120	1 996 323 546	437 627 574	2 433 951 120
21. Kalimantan Tengah		1 921 944 863	132 100 592	2 054 045 455	1 524 344 270	529 701 185	2 054 045 455
22. Kalimantan Selatan		3 148 042 882	324 878 615	3 472 921 497	2 465 733 715	1 007 187 782	3 472 921 497
23. Kalimantan Timur		9 817 099 927	1 652 437 549	11 469 537 476	8 143 272 619	3 326 264 857	11 469 537 476
24. Sulawesi Utara		1 365 705 444	109 273 479	1 474 978 923	1 285 864 832	189 114 091	1 474 978 923
25. Sulawesi Tengah		1 410 593 609	220 705 398	1 631 299 007	1 426 082 334	205 216 673	1 631 299 007
26. Sulawesi Selatan		3 110 566 841	290 514 746	3 401 081 587	3 177 043 310	224 038 277	3 401 081 587
27. Sulawesi Tenggara		1 288 979 728	198 733 017	1 487 712 745	1 328 024 700	159 688 045	1 487 712 745
28. Gorontalo		697 576 031	96 844 215	794 420 246	724 528 423	69 891 823	794 420 246
29. Sulawesi Barat		718 871 064	25 751 453	744 622 517	731 367 815	13 254 702	744 622 517
30. Maluku		1 138 187 347	55 485 451	1 193 672 798	1 109 921 429	83 751 369	1 193 672 798
31. Maluku Utara		936 792 069	15 732 309	952 524 378	724 375 048	228 149 330	952 524 378
32. Papua Barat		3 699 884 166	353 183 633	4 053 067 799	3 629 959 955	423 107 844	4 053 067 799
33. Papua		6 227 545 145	955 938 778	7 183 483 923	6 290 375 713	893 108 210	7 183 483 923
JUMLAH/TOTAL		140 001 241 096	20 503 199 782	160 504 440 878	132 217 711 232	28 286 729 646	160 504 440 878

TABEL 1.d **ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2012**
TABLE **RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2012**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	8 714 807 933	804 130 756	9 518 938 689	9 511 938 689	7 000 000	9 518 938 689
2.	Sumatera Utara	7 332 537 007	700 027 786	8 032 564 793	7 677 852 377	354 712 416	8 032 564 793
3.	Sumatera Barat	2 917 855 223	275 605 000	3 193 460 223	3 121 167 223	72 293 000	3 193 460 223
4.	R i a u	5 487 776 082	953 880 000	6 441 656 082	6 366 656 082	75 000 000	6 441 656 082
5.	J a m b i	1 734 302 275	208 201 282	1 942 503 557	1 942 503 557	0	1 942 503 557
6.	Sumatera Selatan	4 939 147 950	213 204 322	5 152 352 272	4 742 452 272	409 900 000	5 152 352 272
7.	Bengkulu	1 542 457 184	43 697 745	1 586 154 929	1 586 154 929	0	1 586 154 929
8.	Lampung	2 809 749 945	43 500 000	2 853 249 945	2 838 249 945	15 000 000	2 853 249 945
9.	Bangka Belitung	1 385 019 259	75 000 000	1 460 019 259	1 450 019 259	10 000 000	1 460 019 259
10.	Kepulauan Riau	2 038 209 392	373 080 186	2 411 289 578	2 387 789 578	23 500 000	2 411 289 578
11.	DKI Jakarta	30 642 744 353	5 380 600 504	36 023 344 857	33 827 031 650	2 196 313 207	36 023 344 857
12.	Jawa Barat	14 626 494 183	1 570 802 796	16 197 296 979	15 804 296 979	393 000 000	16 197 296 979
13.	Jawa Tengah	10 833 744 293	562 000 000	11 395 744 293	11 245 744 293	150 000 000	11 395 744 293
14.	D I Yogyakarta	1 935 447 748	221 415 561	2 156 863 309	2 124 288 709	32 574 600	2 156 863 309
15.	Jawa Timur	14 727 475 360	1 044 555 318	15 772 030 678	15 153 689 101	618 341 577	15 772 030 678
16.	Banten	3 902 075 000	264 000 000	4 166 075 000	4 134 075 000	32 000 000	4 166 075 000
17.	B a l i	3 249 750 721	456 882 514	3 706 633 235	3 656 633 235	50 000 000	3 706 633 235
18.	Nusa Tenggara Barat	2 241 557 144	62 000 000	2 303 557 144	2 254 557 144	49 000 000	2 303 557 144
19.	Nusa Tenggara Timur	2 207 178 663	30 000 000	2 237 178 663	2 147 354 663	89 824 000	2 237 178 663
20.	Kalimantan Barat	2 837 408 853	115 000 000	2 952 408 853	2 902 408 853	50 000 000	2 952 408 853
21.	Kalimantan Tengah	2 251 744 204	25 000 000	2 276 744 204	2 248 744 204	28 000 000	2 276 744 204
22.	Kalimantan Selatan	2 966 943 629	190 500 000	3 157 443 629	3 108 943 629	48 500 000	3 157 443 629
23.	Kalimantan Timur	9 102 613 100	1 500 000 000	10 602 613 100	10 502 613 100	100 000 000	10 602 613 100
24.	Sulawesi Utara	1 717 270 351	100 698 691	1 817 969 042	1 817 969 042	0	1 817 969 042
25.	Sulawesi Tengah	1 779 106 688	158 092 727	1 937 199 415	1 931 199 415	6 000 000	1 937 199 415
26.	Sulawesi Selatan	4 601 370 274	159 571 791	4 760 942 065	4 760 942 065	0	4 760 942 065
27.	Sulawesi Tenggara	1 846 010 570	180 696 000	2 026 706 570	2 021 706 570	5 000 000	2 026 706 570
28.	Gorontalo	913 401 827	60 000 000	973 401 827	938 401 827	35 000 000	973 401 827
29.	Sulawesi Barat	952 008 830	19 000 000	971 008 830	969 008 830	2 000 000	971 008 830
30.	M a l u k u	1 412 177 393	22 680 003	1 434 857 396	1 429 870 261	4 987 135	1 434 857 396
31.	Maluku Utara	1 125 032 917	145 000 000	1 270 032 917	1 170 032 917	100 000 000	1 270 032 917
32.	Papua Barat	3 893 381 839	130 000 000	4 023 381 839	3 998 380 839	25 001 000	4 023 381 839
33.	P a p u a	7 295 601 882	75 000 000	7 370 601 882	7 182 633 394	187 968 488	7 370 601 882
JUMLAH/TOTAL		165 962 402 072	16 163 822 982	182 126 225 054	176 955 309 631	5 170 915 423	182 126 225 054

TABEL

TABLE 2.

<http://www.bps.go.id>

TABEL 2 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	98 900 034 461	116 802 488 665	140 001 241 096	165 962 402 072
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	45 406 418 865	56 726 589 730	73 620 310 358	75 070 594 095
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	37 668 301 884	47 300 841 241	62 759 000 075	64 212 600 642
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	1 571 581 697	1 454 694 720	1 408 726 470	1 309 071 303
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	1 608 096 150	1 933 195 176	2 524 288 765	2 712 584 738
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	4 558 439 134	6 037 858 593	6 928 295 048	6 836 337 412
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	42 598 264 441	47 519 927 639	52 779 890 539	55 062 089 158
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	15 410 020 005	17 556 536 325	16 447 715 087	16 477 559 088
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	7 177 595 470	9 896 470 197	12 508 737 244	10 196 474 575
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	18 650 182 966	19 247 315 618	22 553 282 483	27 052 242 731
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	1 360 466 000	819 605 499	1 270 155 725	1 335 812 764
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	10 895 351 155	12 555 971 296	13 601 040 199	35 829 718 819
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	22 992 773 028	16 670 537 821	20 503 199 782	16 163 822 982
JUMLAH/TOTAL		121 892 807 489	133 473 026 486	160 504 440 878	182 126 225 054

*) Data APBD

TABEL 2.1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.1 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6 042 467 779	6 967 815 083	7 610 320 146	8 714 807 933
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	735 205 789	796 949 424	802 840 174	804 284 999
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	462 151 773	521 326 413	586 181 446	622 705 834
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	12 040 363	7 493 489	9 416 022	21 096 394
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	75 104 468	98 845 197	66 007 132	102 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	185 909 185	169 284 325	141 235 574	58 482 771
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 570 603 947	984 662 488	2 262 044 905	1 972 238 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	175 323 122	201 970 863	224 636 959	217 900 530
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	837 405 601	118 201 135	1 270 150 474	792 842 760
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	509 686 224	621 074 916	716 646 172	911 081 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	48 189 000	43 415 574	50 611 300	50 413 710
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 736 658 043	5 186 203 171	4 545 435 067	5 938 284 934
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	4 015 380 289	1 842 988 678	1 306 726 214	804 130 756
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		10 057 848 068	8 810 803 761	8 917 046 360	9 518 938 689

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.2

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 212 558 700	3 885 636 140	4 958 481 902	7 332 537 007
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 016 073 324	2 554 780 317	3 578 462 082	4 026 427 214
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 834 682 281	2 271 474 934	3 141 123 907	3 616 583 915
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	29 456 736	35 813 385	31 297 594	30 660 584
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	90 518 048	166 320 144	289 249 771	301 290 525
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	61 416 259	81 171 854	116 790 810	77 892 190
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 167 565 492	1 247 727 249	1 373 897 545	1 686 144 433
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	354 949 737	403 523 966	379 382 434	522 223 279
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 257 935	2 317 944	7 162 107	18 903 527
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	761 054 820	812 747 639	948 867 504	1 103 389 237
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	46 303 000	29 137 700	38 485 500	41 628 390
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	28 919 884	83 128 574	6 122 275	1 619 965 360
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	610 590 952	346 533 462	404 884 723	700 027 786
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		3 823 149 652	4 232 169 602	5 363 366 625	8 032 564 793

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.3

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 026 241 165	1 920 971 383	2 071 161 196	2 917 855 223
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	739 747 093	1 006 820 947	1 147 303 770	1 284 980 243
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	619 270 403	768 724 373	933 800 000	1 070 509 747
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	51 931 638	28 264 854	32 331 466	37 437 645
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	39 582 354	46 814 067	80 602 797	89 304 643
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	28 962 698	163 017 653	100 569 507	87 728 208
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	789 839 834	785 574 959	897 640 879	1 054 459 770
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	86 636 422	103 327 542	90 617 394	98 589 395
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	7 081 400	5 428 657	1 609 290	4 809 290
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	648 943 012	662 403 385	764 680 895	918 560 365
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	47 179 000	14 415 375	40 733 300	32 500 720
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	496 654 238	128 575 477	26 216 547	578 415 210
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	314 029 282	673 887 321	335 221 212	275 605 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 340 270 447	2 594 858 704	2 406 382 408	3 193 460 223

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.4

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	3 231 912 094	4 346 845 188	5 440 440 485	5 487 776 082
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 352 412 744	1 339 265 321	2 210 130 782	1 824 503 721
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 072 192 524	1 100 000 000	1 773 621 889	1 502 894 085
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	36 428 217	6 897 102	8 490 985	6 563 061
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	101 704 377	108 478 460	131 607 412	157 156 815
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	142 087 626	123 889 759	296 410 496	157 889 760
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 879 148 800	2 986 535 692	3 226 836 381	2 998 998 652
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	407 314 202	555 978 232	465 189 186	459 567 540
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 299 983 640	2 349 319 803	2 324 772 671	1 987 759 828
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	171 850 958	58 869 157	380 051 124	489 179 914
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	22 368 500	56 823 400	62 491 370
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	350 550	21 044 175	3 473 322	664 273 709
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	871 076 872	114 587 470	421 520 453	953 880 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		4 102 988 966	4 461 432 658	5 861 960 938	6 441 656 082

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.5

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 353 900 464	1 640 185 858	2 078 806 913	1 734 302 275
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	526 442 077	686 629 362	984 232 580	713 559 312
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	438 533 680	602 355 303	838 851 529	605 317 580
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	36 852 013	43 609 629	10 195 268	7 462 787
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	9 551 179	12 443 520	21 703 149	11 106 827
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	41 505 205	28 220 910	113 482 634	89 672 118
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	802 060 280	932 205 660	1 075 207 719	1 019 543 053
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	133 568 381	157 838 823	165 268 384	152 543 511
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	159 865 020	265 593 366	301 321 322	235 443 809
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	473 505 879	488 743 471	583 882 413	598 882 413
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	35 121 000	20 030 000	24 735 600	32 673 320
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	25 398 107	21 350 836	19 366 614	1 199 910
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	386 301 605	201 204 877	353 260 385	208 201 282
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 740 202 069	1 841 390 735	2 432 067 298	1 942 503 557

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.6

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS
PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 397 685 724	3 224 159 595	3 963 984 966	4 939 147 950
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 054 332 693	1 371 083 868	1 849 119 912	1 899 649 695
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	895 326 986	1 226 712 548	1 671 518 572	1 724 326 700
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	14 770 365	17 747 278	11 682 782	16 805 995
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	56 809 947	61 183 357	78 956 548	87 949 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	87 425 395	65 440 685	86 962 010	70 568 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 333 161 326	1 823 059 237	1 992 557 000	2 205 077 535
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	323 125 392	431 004 842	379 632 596	448 922 858
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	502 680 051	862 163 718	933 824 103	994 599 986
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	507 355 883	512 083 577	646 813 301	716 153 261
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	17 807 100	32 287 000	45 401 430
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	10 191 705	30 016 490	122 308 054	834 420 720
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	288 684 451	315 250 644	390 314 822	213 204 322
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 686 370 175	3 539 410 239	4 354 299 788	5 152 352 272

*) Data APBD

TABEL 2.7 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.7 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF RECEIPT**
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	914 357 986	1 000 860 633	1 166 982 246	1 542 457 184
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	287 781 580	351 091 488	440 928 213	479 298 148
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	203 676 212	259 804 030	333 103 966	358 382 760
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	49 231 277	59 610 610	6 590 792	10 144 174
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 286 352	10 895 322	12 488 395	12 948 883
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	22 587 739	20 781 526	88 745 060	97 822 331
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	589 497 876	598 799 426	712 256 295	854 530 115
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	46 526 570	52 026 355	18 519 664	48 257 592
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 354 812	2 747 881	49 738 995	2 340 747
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	487 339 494	523 041 290	607 388 036	775 311 166
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	53 277 000	20 983 900	36 609 600	28 620 610
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	37 078 530	50 969 719	13 797 738	208 628 921
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	218 702 463	10 570 146	39 678 718	43 697 745
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 133 060 449	1 011 430 779	1 206 660 964	1 586 154 929

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.8

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 742 386 840	2 091 684 131	2 527 990 902	2 809 749 945
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	860 357 826	1 118 340 908	1 395 675 721	1 600 273 136
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	725 464 224	951 316 481	1 199 945 831	1 434 507 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	75 266 014	7 159 463	8 689 231	6 636 336
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 137 116	12 869 366	19 398 638	18 035 480
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	47 490 472	146 995 598	167 642 021	141 094 320
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	829 026 291	908 420 168	1 063 287 255	1 192 114 809
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	98 328 704	130 179 866	126 734 977	131 582 293
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	62 175 914	107 290 368	124 369 040	90 305 589
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	628 505 673	643 376 134	769 973 038	939 139 287
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	40 016 000	27 573 800	42 210 200	31 087 640
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	53 002 723	64 923 055	69 027 926	17 362 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	183 672 386	79 029 066	161 181 629	43 500 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 926 059 226	2 170 713 197	2 689 172 531	2 853 249 945

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.9

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS
PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	804 845 143	848 025 113	1 193 497 245	1 385 019 259
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	246 799 845	328 122 025	459 208 310	420 581 023
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	215 623 985	296 214 789	418 338 202	386 114 313
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	4 043 048	2 628 024	3 565 501	2 239 882
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	1 771 547	3 077 328	4 016 266	1 906 601
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	25 361 265	26 201 884	33 288 341	30 320 227
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	557 876 173	519 288 576	700 510 364	785 306 156
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	44 007 941	52 057 507	55 995 923	52 365 736
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	60 310 388	48 516 961	145 043 626	73 716 955
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	407 994 844	410 642 308	481 589 915	634 087 815
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	45 563 000	8 071 800	17 880 900	25 135 650
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	169 125	614 512	33 778 571	179 132 080
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	315 545 870	264 129 736	240 432 353	75 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 120 391 013	1 112 154 849	1 433 929 598	1 460 019 259

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.10

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS
PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 459 000 000	1 853 589 773	1 876 879 092	2 038 209 392
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	381 946 943	522 006 644	620 901 422	572 308 355
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	364 442 649	493 565 569	572 738 970	542 745 300
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	3 560 000	1 475 997	1 655 565	1 700 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	680 000	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 264 294	26 965 078	46 506 887	27 863 055
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 077 053 057	1 310 792 978	1 246 904 170	1 302 611 457
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	193 843 308	234 376 006	217 469 127	222 566 530
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	459 146 269	761 696 229	611 786 301	596 021 520
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	403 132 480	310 161 843	395 745 542	460 857 807
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	20 931 000	4 558 900	21 903 200	23 165 600
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	20 790 151	9 073 500	163 289 580
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	391 953 213	242 173 799	375 005 362	373 080 186
JUMLAH/TOTAL		1 850 953 213	2 095 763 572	2 251 884 454	2 411 289 578

*) Data APBD

TABEL 2.11 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.11 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	19 251 893 888	23 025 986 993	28 297 361 175	30 642 744 353
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	10 601 057 958	12 891 992 182	17 825 986 987	18 685 000 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	8 560 134 926	10 751 745 151	15 221 249 846	15 625 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	416 899 029	439 210 908	609 349 051	500 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	181 130 584	223 005 616	278 789 768	360 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1 442 893 419	1 478 030 507	1 716 598 322	2 200 000 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	8 650 835 930	9 537 609 058	9 149 708 963	9 111 459 442
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	8 580 181 350	9 398 613 244	8 747 636 170	8 742 013 025
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	70 654 580	138 995 814	192 163 351	159 536 975
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	0	0	209 909 442	209 909 442
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	596 385 753	1 321 665 225	2 846 284 911
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	4 446 373 058	3 748 512 147	4 926 078 266	5 380 600 504
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		23 698 266 946	26 774 499 140	33 223 439 441	36 023 344 857

*) Data APBD

TABEL 2.12 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.12 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	7 785 889 984	9 742 187 781	11 053 859 588	14 626 494 183
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah	5 577 588 779	7 252 242 913	8 502 643 155	8 176 352 694
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	4 979 386 047	6 470 866 063	7 696 484 754	7 586 456 000
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	36 717 162	32 248 950	50 737 863	49 761 341
	<i>Repayments</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179 835 133	226 365 880	229 147 336	237 497 782
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	381 650 437	522 762 020	526 273 202	302 637 571
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	2 172 729 228	2 427 857 461	2 526 078 027	2 235 856 731
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	939 646 464	1 113 053 612	999 708 518	774 741 041
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	248 784 940	190 109 609	299 051 801	142 798 650
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	984 297 824	1 086 123 940	1 181 553 108	1 269 960 760
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	0	38 570 300	45 764 600	48 356 280
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	35 571 977	62 087 407	25 138 406	4 214 284 758
	<i>Other Legal Revenue</i>				
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	2 457 196 766	1 789 756 684	2 449 742 872	1 570 802 796
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		10 243 086 750	11 531 944 465	13 503 602 460	16 197 296 979

*) Data APBD

TABEL 2.13 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	5 696 660 052	6 626 316 989	7 547 669 804	10 833 744 293
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	4 000 735 711	4 785 133 227	5 564 233 152	5 799 955 330
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	3 236 777 063	3 893 699 996	4 599 046 987	4 873 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	127 405 511	127 651 269	64 549 242	66 032 838
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	153 848 190	195 631 744	211 976 159	222 282 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	482 704 947	568 150 218	688 660 764	638 640 492
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 691 853 080	1 811 657 949	1 950 189 365	2 130 486 342
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	547 901 611	604 154 702	511 527 047	475 500 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	9 771 868	10 411 240	110 692 295	87 462 941
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 130 742 601	1 168 787 757	1 276 180 223	1 516 892 951
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	3 437 000	28 304 250	51 789 800	50 630 450
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	4 071 261	29 525 813	33 247 287	2 903 302 621
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	683 817 617	904 356 288	1 239 075 792	562 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		6 380 477 669	7 530 673 277	8 786 745 596	11 395 744 293

*) Data APBD

TABEL 2.14 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.14 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF RECEIPT**
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 286 067 485	1 374 205 096	1 604 910 831	1 935 447 748
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	645 145 551	740 202 076	867 112 885	800 156 498
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	541 192 266	634 710 019	735 226 106	689 572 065
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	34 785 229	34 116 476	35 985 658	36 228 288
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	20 094 713	26 333 870	28 961 383	31 863 499
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	49 073 343	45 041 711	66 939 738	42 492 646
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	631 011 121	626 677 339	722 339 653	850 513 085
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	73 677 652	87 816 512	75 967 202	74 398 963
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 521	5 480	6 070 523	4 686
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	523 919 948	527 471 247	620 812 328	757 056 696
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	33 410 000	11 384 100	19 489 600	19 052 740
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	9 910 813	7 325 681	15 458 293	284 778 165
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	285 824 679	256 568 355	254 231 964	221 415 561
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 571 892 164	1 630 773 451	1 859 142 795	2 156 863 309

*) Data APBD

TABEL 2.15 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.15 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF RECEIPT**
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	7 827 694 815	9 980 544 750	11 493 375 583	14 727 475 360
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	5 708 030 337	7 478 530 080	8 898 616 683	9 068 160 048
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	4 891 816 303	5 907 320 403	7 298 242 129	7 502 400 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	75 950 583	66 237 597	66 359 751	123 663 970
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	227 446 226	243 826 826	365 149 165	320 317 073
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	512 817 225	1 261 145 254	1 168 865 638	1 121 779 005
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2 093 556 409	2 445 304 862	2 528 086 450	2 785 080 972
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	941 891 859	1 165 084 944	1 110 351 896	1 226 124 388
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	15 185 200	10 302 953	15 201 655	14 607 768
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 118 478 350	1 212 934 765	1 347 501 699	1 491 561 136
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	18 001 000	56 982 200	55 031 200	52 787 680
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	26 108 069	56 709 808	66 672 450	2 874 234 340
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	2 061 246 529	1 995 753 452	1 564 783 382	1 044 555 318
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		9 888 941 344	11 976 298 202	13 058 158 965	15 772 030 678

*) Data APBD

TABEL 2.16 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.16 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 436 096 122	3 139 437 626	3 755 614 332	3 902 075 000
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 687 721 367	2 321 586 438	2 895 569 551	2 981 553 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 617 821 795	2 208 083 478	2 769 882 159	2 841 335 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	2 921 743	3 207 707	3 780 186	5 818 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	29 415 352	37 874 447	31 532 942	60 800 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	37 562 477	72 420 806	90 374 264	73 600 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	744 966 513	812 654 174	849 490 704	916 372 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	351 030 720	416 150 982	341 626 487	355 430 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	635 706	863 573	2 300 934	422 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	361 179 087	381 979 019	460 383 683	530 833 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	32 121 000	13 660 600	45 179 600	29 687 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 408 242	5 197 014	10 554 077	4 150 000
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	237 720 327	235 495 508	535 848 290	264 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 673 816 449	3 374 933 134	4 291 462 622	4 166 075 000

*) Data APBD

TABEL 2.17 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.17 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PENDAPATAN DAERAH		1 902 227 543	2 237 707 339	2 662 077 116	3 249 750 721
LOCAL GOVERNMENT REVENUE					
1.	Pendapatan Asli Daerah	1 163 947 552	1 393 730 257	1 723 617 736	1 751 375 903
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	1 027 714 551	1 221 182 092	1 496 933 887	1 595 931 327
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	21 111 558	20 940 232	33 541 288	34 144 911
	<i>Retributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53 713 430	60 788 386	70 314 131	73 250 205
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	61 408 013	90 819 547	122 828 430	48 049 460
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	636 608 487	649 257 693	705 288 133	852 217 765
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	128 712 266	150 963 833	128 698 319	124 112 775
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0	0	0	0
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	471 788 221	489 942 535	560 673 539	694 079 080
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	36 108 000	8 351 325	15 916 275	34 025 910
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	101 671 504	194 719 389	233 171 247	646 157 053
	<i>Other Legal Revenue</i>				
B. PEMBIAYAAN DAERAH		468 108 450	538 452 871	704 385 153	456 882 514
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/TOTAL		2 370 335 993	2 776 160 210	3 366 462 269	3 706 633 235

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.18

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 173 506 085	1 272 218 059	1 689 351 249	2 241 557 144
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	471 988 816	515 340 957	741 291 175	721 467 377
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	369 172 469	391 690 342	506 909 926	510 577 006
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	47 581 597	54 900 839	59 564 965	15 654 712
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	25 192 762	40 937 455	135 639 075	77 891 340
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	30 041 988	27 812 321	39 177 209	117 344 319
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	701 175 944	756 256 439	855 310 099	1 046 195 367
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	65 768 462	112 925 607	131 498 518	138 609 211
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	32 951 518	45 501 002	31 176 098	44 642 101
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	554 431 964	573 065 430	646 671 083	809 617 715
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	48 024 000	24 764 400	45 964 400	53 326 340
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	341 325	620 663	92 749 975	473 894 400
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	63 928 652	73 514 841	17 280 030	62 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 237 434 737	1 345 732 900	1 706 631 279	2 303 557 144

*) Data APBD

TABEL 2.19 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.19 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 023 505 681	1 088 071 459	1 324 470 172	2 207 178 663
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	255 674 617	298 154 337	391 828 733	389 646 774
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	164 358 587	195 007 612	266 729 264	245 797 393
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	44 389 652	47 973 591	10 446 385	9 530 667
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	11 452 770	19 826 431	33 862 764	38 030 160
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	35 473 608	35 346 703	80 790 320	96 288 554
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	767 566 614	773 795 618	887 291 439	1 102 993 489
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	54 842 414	68 647 419	86 798 049	104 385 013
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	234 197	263 132	1 036 546	872 762
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	652 757 003	674 635 569	752 057 444	940 646 764
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	59 733 000	30 249 498	47 399 400	57 088 950
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	264 450	16 121 504	45 350 000	714 538 400
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	268 175 864	224 112 521	120 234 844	30 000 000
JUMLAH/TOTAL		1 291 681 545	1 312 183 980	1 444 705 016	2 237 178 663

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.20

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 577 890 709	1 778 927 314	2 202 217 037	2 837 408 853
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	579 575 650	777 243 196	1 080 456 052	1 113 387 576
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	450 518 927	620 608 802	901 500 403	950 304 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	70 156 538	78 579 088	84 659 762	89 296 714
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	25 241 502	35 202 158	40 348 020	46 637 309
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	33 658 683	42 853 148	53 947 867	27 149 553
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	970 706 171	920 636 282	1 037 860 159	1 207 642 847
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	160 261 092	127 979 083	126 761 996	122 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	12 296 934	7 915 306	27 244 775	18 500 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	744 834 145	755 123 093	845 483 888	1 023 229 807
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	53 314 000	29 618 800	38 369 500	43 913 040
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	27 608 888	81 047 836	83 900 826	516 378 430
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	222 153 924	173 009 098	231 734 083	115 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 800 044 633	1 951 936 412	2 433 951 120	2 952 408 853

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.21

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 367 412 136	1 555 426 286	1 921 944 863	2 251 744 204
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	382 020 409	504 217 391	815 244 765	709 585 825
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	300 825 200	416 518 895	707 444 895	610 400 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	24 073 562	25 282 312	6 493 504	6 397 800
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	22 897 144	17 303 860	19 942 191	20 548 500
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	34 224 503	45 112 324	81 364 175	72 239 525
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	913 061 727	921 225 167	1 083 088 116	1 199 620 348
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	113 202 095	129 086 986	138 131 347	135 480 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	45 741 426	51 961 488	97 225 434	62 700 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	694 822 206	707 880 493	795 816 335	951 256 068
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	59 296 000	32 296 200	51 915 000	50 184 280
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	72 330 000	129 983 728	23 611 982	342 538 031
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	145 923 582	57 885 383	132 100 592	25 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 513 335 718	1 613 311 669	2 054 045 455	2 276 744 204

*) Data APBD

TABEL 2.22 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.22 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	2 109 410 863	2 279 776 309	3 148 042 882	2 966 943 629
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 021 456 330	1 286 258 612	1 868 595 794	1 882 941 507
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	833 641 848	1 088 346 425	1 643 513 495	1 598 445 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	124 902 899	41 660 161	41 134 809	5 892 468
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	23 035 518	8 388 793	53 898	43 255 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	39 876 065	147 863 233	183 893 592	235 349 039
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 004 989 665	930 124 574	1 195 565 014	1 038 922 552
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	116 001 431	142 683 191	133 959 403	135 500 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	361 576 568	309 529 316	519 483 059	356 600 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	484 059 666	458 074 767	504 876 152	521 822 552
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	43 352 000	19 837 300	37 246 400	25 000 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	82 964 868	63 393 123	83 882 074	45 079 570
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	549 419 700	492 660 308	324 878 615	190 500 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		2 658 830 563	2 772 436 617	3 472 921 497	3 157 443 629

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.23

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	5 348 926 268	7 044 556 875	9 817 099 927	9 102 613 100
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 208 309 119	2 714 815 547	4 501 210 028	4 295 804 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 539 702 678	2 023 934 390	3 679 366 875	3 558 500 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	5 621 676	10 787 074	13 699 032	10 085 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	121 104 217	137 612 246	215 652 587	222 692 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	541 880 548	542 481 837	592 491 534	504 527 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	3 122 061 454	4 308 464 375	5 295 875 915	4 392 796 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	576 616 211	653 810 498	688 989 457	600 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 523 474 916	3 620 846 163	4 517 251 513	3 687 267 345
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	18 159 327	164 514	51 446 845	52 637 761
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	3 811 000	33 643 200	38 188 100	52 890 894
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	18 555 695	21 276 953	20 013 984	414 013 100
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	2 007 208 728	808 568 904	1 652 437 549	1 500 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		7 356 134 996	7 853 125 779	11 469 537 476	10 602 613 100

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.24

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 023 349 288	1 158 671 349	1 365 705 444	1 717 270 351
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	331 083 668	418 737 661	535 087 975	549 354 886
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	289 214 884	373 765 054	477 202 211	507 063 465
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	7 566 535	11 933 613	8 866 084	7 091 421
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	16 369 246	13 553 666	23 107 361	20 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	17 933 003	19 485 328	25 912 319	15 200 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	674 267 802	650 530 096	729 361 142	889 074 421
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	61 298 807	73 405 246	67 711 925	54 770 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 455 064	904 637	12 650 010	230 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	558 634 931	558 781 013	619 711 007	790 534 491
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	52 879 000	17 439 200	29 288 200	43 539 930
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	17 997 818	89 403 592	101 256 327	278 841 044
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	399 104 168	347 025 574	109 273 479	100 698 691
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 422 453 456	1 505 696 923	1 474 978 923	1 817 969 042

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.25

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS
PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	1 052 332 635	1 177 609 898	1 410 593 609	1 779 106 688
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	275 191 234	411 797 140	519 974 416	466 834 895
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	223 061 767	344 354 728	421 221 594	400 380 372
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	20 731 195	29 650 214	14 058 850	2 183 644
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	7 525 806	11 384 015	17 796 093	17 796 093
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	23 872 466	26 408 183	66 897 879	46 474 786
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	756 439 213	759 172 265	864 098 666	988 224 643
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	65 468 194	69 360 924	73 268 339	9 482 569
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 516 833	1 883 270	9 489 468	33 417 275
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	629 397 186	659 331 271	743 161 759	902 087 729
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	60 057 000	28 596 800	38 179 100	43 237 070
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	20 702 188	6 640 493	26 520 527	324 047 150
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	189 511 577	177 052 220	220 705 398	158 092 727
JUMLAH/TOTAL		1 241 844 212	1 354 662 118	1 631 299 007	1 937 199 415

*) Data APBD

TABEL 2.26 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.26 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	2 175 750 141	2 564 075 935	3 110 566 841	4 601 370 274
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 242 766 168	1 545 589 709	1 959 515 902	2 348 695 403
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 044 931 821	1 334 804 021	1 729 075 998	2 102 449 612
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	100 604 093	108 560 877	111 625 000	123 880 288
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	59 350 545	51 551 621	62 366 615	64 987 093
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	37 879 709	50 673 190	56 448 289	57 378 410
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	914 502 834	959 942 494	1 106 989 189	1 323 873 981
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	197 154 690	217 385 913	230 606 605	271 632 092
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	9 076 750	7 003 880	17 738 615	12 527 835
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	663 422 394	706 276 399	816 757 969	996 939 584
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	44 849 000	29 276 302	41 886 000	42 774 470
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	18 481 139	58 543 732	44 061 750	928 800 890
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	183 706 090	230 448 199	290 514 746	159 571 791
JUMLAH/TOTAL		2 359 456 231	2 794 524 134	3 401 081 587	4 760 942 065

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.27

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF RECEIPT (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 030 720 131	1 055 173 630	1 288 979 728	1 846 010 570
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	223 128 481	339 360 819	346 169 831	532 565 715
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	171 402 251	202 929 981	262 509 202	260 226 994
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	40 252 603	51 035 765	18 543 870	23 072 342
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	4 871 004	14 103 892	13 488 191	29 150 010
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	6 602 623	71 291 181	51 628 568	220 116 369
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	705 062 822	691 637 811	817 385 234	1 010 575 505
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	53 254 936	64 736 445	64 314 517	86 943 834
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 645 752	7 106 547	18 429 560	19 089 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	589 844 134	595 762 419	700 836 557	869 882 871
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	56 318 000	24 032 400	33 804 600	34 659 800
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	102 528 828	24 175 000	125 424 663	302 869 350
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	124 465 203	106 197 607	198 733 017	180 696 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 155 185 334	1 161 371 237	1 487 712 745	2 026 706 570

*) Data APBD

TABEL 2.28 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.28 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	561 186 326	593 415 093	697 576 031	913 401 827
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	102 626 018	133 147 652	158 083 317	161 639 396
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	86 443 156	120 748 491	144 751 936	150 012 734
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	0	0	0	100 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	16 182 862	12 399 161	13 331 381	11 526 662
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	458 560 308	438 419 416	515 369 177	630 131 541
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	18 683 429	26 766 048	26 066 409	23 901 830
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	205 623	167 648	127 466	81 179
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	388 325 256	400 750 820	461 118 102	582 140 302
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	51 346 000	10 734 900	28 057 200	24 008 230
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	21 848 025	24 123 537	121 630 890
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	123 276 331	65 070 534	96 844 215	60 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		684 462 657	658 485 627	794 420 246	973 401 827

*) Data APBD

TABEL
TABLE 2.29

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS
PENERIMAAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	554 240 280	610 378 110	718 871 064	952 008 830
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	64 444 722	90 207 582	114 310 885	134 984 569
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	55 399 980	78 352 878	96 383 467	94 930 186
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	1 407 597	1 908 405	2 041 884	6 855 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	2 522	25 406	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	7 637 145	9 943 777	15 860 128	33 199 383
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	482 372 729	456 339 988	512 742 098	663 009 281
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	24 770 036	32 835 423	34 885 738	35 209 966
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	489 187	222 988	416 862	332 674
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	391 060 506	405 749 577	441 578 798	590 680 361
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	66 053 000	17 532 000	35 860 700	36 786 280
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	7 422 829	63 830 540	91 818 081	154 014 980
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	59 884 225	23 221 030	25 751 453	19 000 000
JUMLAH/TOTAL		614 124 505	633 599 140	744 622 517	971 008 830

*) Data APBD

TABEL 2.30 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN**
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	1 008 730 045	952 660 802	1 138 187 347	1 412 177 393
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	146 189 045	169 568 947	221 882 123	243 557 212
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	94 307 563	116 396 548	164 845 694	190 359 188
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	21 641 650	25 304 142	25 426 006	21 348 874
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	16 500 000	17 061 249	17 190 530	19 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 739 832	10 807 008	14 419 893	12 849 150
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	704 206 719	715 451 154	828 272 878	950 038 311
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	55 303 238	72 048 913	75 254 690	78 525 906
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 472 684	3 058 590	4 366 535	3 958 251
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	578 163 797	607 572 176	703 993 953	829 491 474
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	68 267 000	32 771 475	44 657 700	38 062 680
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	158 334 281	67 640 701	88 032 346	218 581 870
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	64 679 783	58 385 591	55 485 451	22 680 003
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		1 073 409 828	1 011 046 393	1 193 672 798	1 434 857 396

*) Data APBD

TABEL 2.31 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.31 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	685 771 448	695 828 538	936 792 069	1 125 032 917
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	73 292 408	77 842 743	84 811 588	93 648 705
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	51 029 373	61 999 098	76 653 533	76 453 066
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	12 450 354	10 542 401	3 921 064	14 786 167
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	76 190	65 943	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	9 812 681	5 225 054	4 171 048	2 409 472
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	612 479 040	604 964 763	691 007 327	820 571 202
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	49 775 494	69 097 630	67 685 366	67 462 302
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	20 533 886	30 000 369	31 698 350	12 091 855
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	458 511 660	479 480 664	540 389 811	703 159 025
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	83 658 000	26 386 100	51 233 800	37 858 020
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	13 021 032	160 973 154	210 813 010
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	81 106 646	2 872 955	15 732 309	145 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		766 878 094	698 701 493	952 524 378	1 270 032 917

*) Data APBD

TABEL 2.32 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.32 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT REVENUE	2 822 594 303	3 407 802 988	3 699 884 166	3 893 381 839
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	73 617 899	125 774 327	152 163 909	134 500 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	65 295 146	99 847 508	119 509 796	105 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	254 577	1 091 318	1 137 679	1 000 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	1 096 715	4 961 194	5 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	8 068 176	23 738 786	26 555 240	23 500 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 030 362 654	1 462 347 938	1 483 865 431	1 690 031 563
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	167 370 968	184 845 998	193 485 191	170 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	198 655 957	649 958 976	549 396 430	580 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	595 755 729	605 786 464	700 444 910	901 398 453
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	68 580 000	21 756 500	40 538 900	38 633 110
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 718 613 750	1 819 680 723	2 063 854 826	2 068 850 276
B.	PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING	49 003 746	129 160 000	353 183 633	130 000 000
JUMLAH/TOTAL		2 871 598 049	3 536 962 988	4 053 067 799	4 023 381 839

*) Data APBD

TABEL 2.33 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 2.33 ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF RECEIPT
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Penerimaan <i>Kind of Receipt</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6 012 822 338	5 661 736 549	6 227 545 145	7 295 601 882
	LOCAL GOVERNMENT REVENUE				
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	369 727 112	380 025 633	363 100 750	403 560 936
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	242 788 566	252 434 826	275 091 606	273 920 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	20 576 683	21 171 950	18 889 331	15 500 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	28 926 620	30 340 833	19 887 905	19 887 900
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	77 435 243	76 078 024	49 231 908	94 253 036
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 563 054 901	1 762 534 290	1 893 484 847	2 155 377 790
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	203 582 807	252 799 170	269 335 254	316 816 909
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	219 971 330	286 182 154	275 748 035	162 587 267
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 058 227 764	1 148 497 966	1 276 285 908	1 569 782 444
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	81 273 000	75 055 000	72 115 650	106 191 170
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	4 080 040 325	3 519 176 626	3 970 959 548	4 736 663 156
B.	PEMBIAYAAN DAERAH	225 000 000	142 102 552	955 938 778	75 000 000
	LOCAL GOVERNMENT FINANCING				
JUMLAH/TOTAL		6 237 822 338	5 803 839 101	7 183 483 923	7 370 601 882

*) Data APBD

TABEL

TABLE 3.

<http://www.bps.go.id>

TABEL
TABLE 3.A

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 042 467 779	6 967 815 083	7 610 320 146	8 714 807 933
2.	Sumatera Utara	3 212 558 700	3 885 636 140	4 958 481 902	7 332 537 007
3.	Sumatera Barat	2 026 241 165	1 920 971 383	2 071 161 196	2 917 855 223
4.	R i a u	3 231 912 094	4 346 845 188	5 440 440 485	5 487 776 082
5.	J a m b i	1 353 900 464	1 640 185 858	2 078 806 913	1 734 302 275
6.	Sumatera Selatan	2 397 685 724	3 224 159 595	3 963 984 966	4 939 147 950
7.	Bengkulu	914 357 986	1 000 860 633	1 166 982 246	1 542 457 184
8.	Lampung	1 742 386 840	2 091 684 131	2 527 990 902	2 809 749 945
9.	Bangka Belitung	804 845 143	848 025 113	1 193 497 245	1 385 019 259
10.	Kepulauan Riau	1 459 000 000	1 853 589 773	1 876 879 092	2 038 209 392
11.	DKI Jakarta	19 251 893 888	23 025 986 993	28 297 361 175	30 642 744 353
12.	Jawa Barat	7 785 889 984	9 742 187 781	11 053 859 588	14 626 494 183
13.	Jawa Tengah	5 696 660 052	6 626 316 989	7 547 669 804	10 833 744 293
14.	D I Yogyakarta	1 286 067 485	1 374 205 096	1 604 910 831	1 935 447 748
15.	Jawa Timur	7 827 694 815	9 980 544 750	11 493 375 583	14 727 475 360
16.	Banten	2 436 096 122	3 139 437 626	3 755 614 332	3 902 075 000
17.	B a l i	1 902 227 543	2 237 707 339	2 662 077 116	3 249 750 721
18.	Nusa Tenggara Barat	1 173 506 085	1 272 218 059	1 689 351 249	2 241 557 144
19.	Nusa Tenggara Timur	1 023 505 681	1 088 071 459	1 324 470 172	2 207 178 663
20.	Kalimantan Barat	1 577 890 709	1 778 927 314	2 202 217 037	2 837 408 853
21.	Kalimantan Tengah	1 367 412 136	1 555 426 286	1 921 944 863	2 251 744 204
22.	Kalimantan Selatan	2 109 410 863	2 279 776 309	3 148 042 882	2 966 943 629
23.	Kalimantan Timur	5 348 926 268	7 044 556 875	9 817 099 927	9 102 613 100
24.	Sulawesi Utara	1 023 349 288	1 158 671 349	1 365 705 444	1 717 270 351
25.	Sulawesi Tengah	1 052 332 635	1 177 609 898	1 410 593 609	1 779 106 688
26.	Sulawesi Selatan	2 175 750 141	2 564 075 935	3 110 566 841	4 601 370 274
27.	Sulawesi Tenggara	1 030 720 131	1 055 173 630	1 288 979 728	1 846 010 570
28.	Gorontalo	561 186 326	593 415 093	697 576 031	913 401 827
29.	Sulawesi Barat	554 240 280	610 378 110	718 871 064	952 008 830
30.	M a l u k u	1 008 730 045	952 660 802	1 138 187 347	1 412 177 393
31.	Maluku Utara	685 771 448	695 828 538	936 792 069	1 125 032 917
32.	Papua Barat	2 822 594 303	3 407 802 988	3 699 884 166	3 893 381 839
33.	P a p u a	6 012 822 338	5 661 736 549	6 227 545 145	7 295 601 882
JUMLAH/TOTAL		98 900 034 461	116 802 488 665	140 001 241 096	165 962 402 072

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2009-2012**
**ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	735 205 789	796 949 424	802 840 174	804 284 999
2.	Sumatera Utara	2 016 073 324	2 554 780 317	3 578 462 082	4 026 427 214
3.	Sumatera Barat	739 747 093	1 006 820 947	1 147 303 770	1 284 980 243
4.	R i a u	1 352 412 744	1 339 265 321	2 210 130 782	1 824 503 721
5.	J a m b i	526 442 077	686 629 362	984 232 580	713 559 312
6.	Sumatera Selatan	1 054 332 693	1 371 083 868	1 849 119 912	1 899 649 695
7.	Bengkulu	287 781 580	351 091 488	440 928 213	479 298 148
8.	Lampung	860 357 826	1 118 340 908	1 395 675 721	1 600 273 136
9.	Bangka Belitung	246 799 845	328 122 025	459 208 310	420 581 023
10.	Kepulauan Riau	381 946 943	522 006 644	620 901 422	572 308 355
11.	DKI Jakarta	10 601 057 958	12 891 992 182	17 825 986 987	18 685 000 000
12.	Jawa Barat	5 577 588 779	7 252 242 913	8 502 643 155	8 176 352 694
13.	Jawa Tengah	4 000 735 711	4 785 133 227	5 564 233 152	5 799 955 330
14.	D I Yogyakarta	645 145 551	740 202 076	867 112 885	800 156 498
15.	Jawa Timur	5 708 030 337	7 478 530 080	8 898 616 683	9 068 160 048
16.	Banten	1 687 721 367	2 321 586 438	2 895 569 551	2 981 553 000
17.	B a l i	1 163 947 552	1 393 730 257	1 723 617 736	1 751 375 903
18.	Nusa Tenggara Barat	471 988 816	515 340 957	741 291 175	721 467 377
19.	Nusa Tenggara Timur	255 674 617	298 154 337	391 828 733	389 646 774
20.	Kalimantan Barat	579 575 650	777 243 196	1 080 456 052	1 113 387 576
21.	Kalimantan Tengah	382 020 409	504 217 391	815 244 765	709 585 825
22.	Kalimantan Selatan	1 021 456 330	1 286 258 612	1 868 595 794	1 882 941 507
23.	Kalimantan Timur	2 208 309 119	2 714 815 547	4 501 210 028	4 295 804 000
24.	Sulawesi Utara	331 083 668	418 737 661	535 087 975	549 354 886
25.	Sulawesi Tengah	275 191 234	411 797 140	519 974 416	466 834 895
26.	Sulawesi Selatan	1 242 766 168	1 545 589 709	1 959 515 902	2 348 695 403
27.	Sulawesi Tenggara	223 128 481	339 360 819	346 169 831	532 565 715
28.	Gorontalo	102 626 018	133 147 652	158 083 317	161 639 396
29.	Sulawesi Barat	64 444 722	90 207 582	114 310 885	134 984 569
30.	M a l u k u	146 189 045	169 568 947	221 882 123	243 557 212
31.	Maluku Utara	73 292 408	77 842 743	84 811 588	93 648 705
32.	Papua Barat	73 617 899	125 774 327	152 163 909	134 500 000
33.	P a p u a	369 727 112	380 025 633	363 100 750	403 560 936
JUMLAH/ TOTAL		45 406 418 865	56 726 589 730	73 620 310 358	75 070 594 095

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.1

**REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),
2009-2012**
**ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	462 151 773	521 326 413	586 181 446	622 705 834
2.	Sumatera Utara	1 834 682 281	2 271 474 934	3 141 123 907	3 616 583 915
3.	Sumatera Barat	619 270 403	768 724 373	933 800 000	1 070 509 747
4.	R i a u	1 072 192 524	1 100 000 000	1 773 621 889	1 502 894 085
5.	J a m b i	438 533 680	602 355 303	838 851 529	605 317 580
6.	Sumatera Selatan	895 326 986	1 226 712 548	1 671 518 572	1 724 326 700
7.	Bengkulu	203 676 212	259 804 030	333 103 966	358 382 760
8.	Lampung	725 464 224	951 316 481	1 199 945 831	1 434 507 000
9.	Bangka Belitung	215 623 985	296 214 789	418 338 202	386 114 313
10.	Kepulauan Riau	364 442 649	493 565 569	572 738 970	542 745 300
11.	DKI Jakarta	8 560 134 926	10 751 745 151	15 221 249 846	15 625 000 000
12.	Jawa Barat	4 979 386 047	6 470 866 063	7 696 484 754	7 586 456 000
13.	Jawa Tengah	3 236 777 063	3 893 699 996	4 599 046 987	4 873 000 000
14.	D I Yogyakarta	541 192 266	634 710 019	735 226 106	689 572 065
15.	Jawa Timur	4 891 816 303	5 907 320 403	7 298 242 129	7 502 400 000
16.	Banten	1 617 821 795	2 208 083 478	2 769 882 159	2 841 335 000
17.	B a l i	1 027 714 551	1 221 182 092	1 496 933 887	1 595 931 327
18.	Nusa Tenggara Barat	369 172 469	391 690 342	506 909 926	510 577 006
19.	Nusa Tenggara Timur	164 358 587	195 007 612	266 729 264	245 797 393
20.	Kalimantan Barat	450 518 927	620 608 802	901 500 403	950 304 000
21.	Kalimantan Tengah	300 825 200	416 518 895	707 444 895	610 400 000
22.	Kalimantan Selatan	833 641 848	1 088 346 425	1 643 513 495	1 598 445 000
23.	Kalimantan Timur	1 539 702 678	2 023 934 390	3 679 366 875	3 558 500 000
24.	Sulawesi Utara	289 214 884	373 765 054	477 202 211	507 063 465
25.	Sulawesi Tengah	223 061 767	344 354 728	421 221 594	400 380 372
26.	Sulawesi Selatan	1 044 931 821	1 334 804 021	1 729 075 998	2 102 449 612
27.	Sulawesi Tenggara	171 402 251	202 929 981	262 509 202	260 226 994
28.	Gorontalo	86 443 156	120 748 491	144 751 936	150 012 734
29.	Sulawesi Barat	55 399 980	78 352 878	96 383 467	94 930 186
30.	M a l u k u	94 307 563	116 396 548	164 845 694	190 359 188
31.	Maluku Utara	51 029 373	61 999 098	76 653 533	76 453 066
32.	Papua Barat	65 295 146	99 847 508	119 509 796	105 000 000
33.	P a p u a	242 788 566	252 434 826	275 091 606	273 920 000
JUMLAH/ TOTAL		37 668 301 884	47 300 841 241	62 759 000 075	64 212 600 642

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.2

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM RETRIBUTIONS THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	12 040 363	7 493 489	9 416 022	21 096 394
2.	Sumatera Utara	29 456 736	35 813 385	31 297 594	30 660 584
3.	Sumatera Barat	51 931 638	28 264 854	32 331 466	37 437 645
4.	R i a u	36 428 217	6 897 102	8 490 985	6 563 061
5.	J a m b i	36 852 013	43 609 629	10 195 268	7 462 787
6.	Sumatera Selatan	14 770 365	17 747 278	11 682 782	16 805 995
7.	Bengkulu	49 231 277	59 610 610	6 590 792	10 144 174
8.	Lampung	75 266 014	7 159 463	8 689 231	6 636 336
9.	Bangka Belitung	4 043 048	2 628 024	3 565 501	2 239 882
10.	Kepulauan Riau	3 560 000	1 475 997	1 655 565	1 700 000
11.	DKI Jakarta	416 899 029	439 210 908	609 349 051	500 000 000
12.	Jawa Barat	36 717 162	32 248 950	50 737 863	49 761 341
13.	Jawa Tengah	127 405 511	127 651 269	64 549 242	66 032 838
14.	D I Yogyakarta	34 785 229	34 116 476	35 985 658	36 228 288
15.	Jawa Timur	75 950 583	66 237 597	66 359 751	123 663 970
16.	Banten	2 921 743	3 207 707	3 780 186	5 818 000
17.	B a l i	21 111 558	20 940 232	33 541 288	34 144 911
18.	Nusa Tenggara Barat	47 581 597	54 900 839	59 564 965	15 654 712
19.	Nusa Tenggara Timur	44 389 652	47 973 591	10 446 385	9 530 667
20.	Kalimantan Barat	70 156 538	78 579 088	84 659 762	89 296 714
21.	Kalimantan Tengah	24 073 562	25 282 312	6 493 504	6 397 800
22.	Kalimantan Selatan	124 902 899	41 660 161	41 134 809	5 892 468
23.	Kalimantan Timur	5 621 676	10 787 074	13 699 032	10 085 000
24.	Sulawesi Utara	7 566 535	11 933 613	8 866 084	7 091 421
25.	Sulawesi Tengah	20 731 195	29 650 214	14 058 850	2 183 644
26.	Sulawesi Selatan	100 604 093	108 560 877	111 625 000	123 880 288
27.	Sulawesi Tenggara	40 252 603	51 035 765	18 543 870	23 072 342
28.	Gorontalo	0	0	0	100 000
29.	Sulawesi Barat	1 407 597	1 908 405	2 041 884	6 855 000
30.	M a l u k u	21 641 650	25 304 142	25 426 006	21 348 874
31.	Maluku Utara	12 450 354	10 542 401	3 921 064	14 786 167
32.	Papua Barat	254 577	1 091 318	1 137 679	1 000 000
33.	P a p u a	20 576 683	21 171 950	18 889 331	15 500 000
JUMLAH/TOTAL		1 571 581 697	1 454 694 720	1 408 726 470	1 309 071 303

*) Data APBD

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK
DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**

TABEL 3.1.3 *ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM INCOME OF REGIONAL
GOVERNMENT CORPORATE AND SEPARATED OF WEALTH MANAGEMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012*

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	75 104 468	98 845 197	66 007 132	102 000 000
2.	Sumatera Utara	90 518 048	166 320 144	289 249 771	301 290 525
3.	Sumatera Barat	39 582 354	46 814 067	80 602 797	89 304 643
4.	R i a u	101 704 377	108 478 460	131 607 412	157 156 815
5.	J a m b i	9 551 179	12 443 520	21 703 149	11 106 827
6.	Sumatera Selatan	56 809 947	61 183 357	78 956 548	87 949 000
7.	Bengkulu	12 286 352	10 895 322	12 488 395	12 948 883
8.	Lampung	12 137 116	12 869 366	19 398 638	18 035 480
9.	Bangka Belitung	1 771 547	3 077 328	4 016 266	1 906 601
10.	Kepulauan Riau	680 000	0	0	0
11.	DKI Jakarta	181 130 584	223 005 616	278 789 768	360 000 000
12.	Jawa Barat	179 835 133	226 365 880	229 147 336	237 497 782
13.	Jawa Tengah	153 848 190	195 631 744	211 976 159	222 282 000
14.	D I Yogyakarta	20 094 713	26 333 870	28 961 383	31 863 499
15.	Jawa Timur	227 446 226	243 826 826	365 149 165	320 317 073
16.	Banten	29 415 352	37 874 447	31 532 942	60 800 000
17.	B a l i	53 713 430	60 788 386	70 314 131	73 250 205
18.	Nusa Tenggara Barat	25 192 762	40 937 455	135 639 075	77 891 340
19.	Nusa Tenggara Timur	11 452 770	19 826 431	33 862 764	38 030 160
20.	Kalimantan Barat	25 241 502	35 202 158	40 348 020	46 637 309
21.	Kalimantan Tengah	22 897 144	17 303 860	19 942 191	20 548 500
22.	Kalimantan Selatan	23 035 518	8 388 793	53 898	43 255 000
23.	Kalimantan Timur	121 104 217	137 612 246	215 652 587	222 692 000
24.	Sulawesi Utara	16 369 246	13 553 666	23 107 361	20 000 000
25.	Sulawesi Tengah	7 525 806	11 384 015	17 796 093	17 796 093
26.	Sulawesi Selatan	59 350 545	51 551 621	62 366 615	64 987 093
27.	Sulawesi Tenggara	4 871 004	14 103 892	13 488 191	29 150 010
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	2 522	25 406	0
30.	M a l u k u	16 500 000	17 061 249	17 190 530	19 000 000
31.	Maluku Utara	0	76 190	65 943	0
32.	Papua Barat	0	1 096 715	4 961 194	5 000 000
33.	P a p u a	28 926 620	30 340 833	19 887 905	19 887 900
JUMLAH/ TOTAL		1 608 096 150	1 933 195 176	2 524 288 765	2 712 584 738

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.1.4

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH
SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. FROM OTHER ORIGINAL PROVINCIAL GOV.
REVENUE THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	185 909 185	169 284 325	141 235 574	58 482 771
2.	Sumatera Utara	61 416 259	81 171 854	116 790 810	77 892 190
3.	Sumatera Barat	28 962 698	163 017 653	100 569 507	87 728 208
4.	R i a u	142 087 626	123 889 759	296 410 496	157 889 760
5.	J a m b i	41 505 205	28 220 910	113 482 634	89 672 118
6.	Sumatera Selatan	87 425 395	65 440 685	86 962 010	70 568 000
7.	Bengkulu	22 587 739	20 781 526	88 745 060	97 822 331
8.	Lampung	47 490 472	146 995 598	167 642 021	141 094 320
9.	Bangka Belitung	25 361 265	26 201 884	33 288 341	30 320 227
10.	Kepulauan Riau	13 264 294	26 965 078	46 506 887	27 863 055
11.	DKI Jakarta	1 442 893 419	1 478 030 507	1 716 598 322	2 200 000 000
12.	Jawa Barat	381 650 437	522 762 020	526 273 202	302 637 571
13.	Jawa Tengah	482 704 947	568 150 218	688 660 764	638 640 492
14.	D I Yogyakarta	49 073 343	45 041 711	66 939 738	42 492 646
15.	Jawa Timur	512 817 225	1 261 145 254	1 168 865 638	1 121 779 005
16.	Banten	37 562 477	72 420 806	90 374 264	73 600 000
17.	B a l i	61 408 013	90 819 547	122 828 430	48 049 460
18.	Nusa Tenggara Barat	30 041 988	27 812 321	39 177 209	117 344 319
19.	Nusa Tenggara Timur	35 473 608	35 346 703	80 790 320	96 288 554
20.	Kalimantan Barat	33 658 683	42 853 148	53 947 867	27 149 553
21.	Kalimantan Tengah	34 224 503	45 112 324	81 364 175	72 239 525
22.	Kalimantan Selatan	39 876 065	147 863 233	183 893 592	235 349 039
23.	Kalimantan Timur	541 880 548	542 481 837	592 491 534	504 527 000
24.	Sulawesi Utara	17 933 003	19 485 328	25 912 319	15 200 000
25.	Sulawesi Tengah	23 872 466	26 408 183	66 897 879	46 474 786
26.	Sulawesi Selatan	37 879 709	50 673 190	56 448 289	57 378 410
27.	Sulawesi Tenggara	6 602 623	71 291 181	51 628 568	220 116 369
28.	Gorontalo	16 182 862	12 399 161	13 331 381	11 526 662
29.	Sulawesi Barat	7 637 145	9 943 777	15 860 128	33 199 383
30.	M a l u k u	13 739 832	10 807 008	14 419 893	12 849 150
31.	Maluku Utara	9 812 681	5 225 054	4 171 048	2 409 472
32.	Papua Barat	8 068 176	23 738 786	26 555 240	23 500 000
33.	P a p u a	77 435 243	76 078 024	49 231 908	94 253 036
JUMLAH/ TOTAL		4 558 439 134	6 037 858 593	6 928 295 048	6 836 337 412

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**

**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 570 603 947	984 662 488	2 262 044 905	1 972 238 000
2.	Sumatera Utara	1 167 565 492	1 247 727 249	1 373 897 545	1 686 144 433
3.	Sumatera Barat	789 839 834	785 574 959	897 640 879	1 054 459 770
4.	R i a u	1 879 148 800	2 986 535 692	3 226 836 381	2 998 998 652
5.	J a m b i	802 060 280	932 205 660	1 075 207 719	1 019 543 053
6.	Sumatera Selatan	1 333 161 326	1 823 059 237	1 992 557 000	2 205 077 535
7.	Bengkulu	589 497 876	598 799 426	712 256 295	854 530 115
8.	Lampung	829 026 291	908 420 168	1 063 287 255	1 192 114 809
9.	Bangka Belitung	557 876 173	519 288 576	700 510 364	785 306 156
10.	Kepulauan Riau	1 077 053 057	1 310 792 978	1 246 904 170	1 302 611 457
11.	DKI Jakarta	8 650 835 930	9 537 609 058	9 149 708 963	9 111 459 442
12.	Jawa Barat	2 172 729 228	2 427 857 461	2 526 078 027	2 235 856 731
13.	Jawa Tengah	1 691 853 080	1 811 657 949	1 950 189 365	2 130 486 342
14.	D I Yogyakarta	631 011 121	626 677 339	722 339 653	850 513 085
15.	Jawa Timur	2 093 556 409	2 445 304 862	2 528 086 450	2 785 080 972
16.	Banten	744 966 513	812 654 174	849 490 704	916 372 000
17.	B a l i	636 608 487	649 257 693	705 288 133	852 217 765
18.	Nusa Tenggara Barat	701 175 944	756 256 439	855 310 099	1 046 195 367
19.	Nusa Tenggara Timur	767 566 614	773 795 618	887 291 439	1 102 993 489
20.	Kalimantan Barat	970 706 171	920 636 282	1 037 860 159	1 207 642 847
21.	Kalimantan Tengah	913 061 727	921 225 167	1 083 088 116	1 199 620 348
22.	Kalimantan Selatan	1 004 989 665	930 124 574	1 195 565 014	1 038 922 552
23.	Kalimantan Timur	3 122 061 454	4 308 464 375	5 295 875 915	4 392 796 000
24.	Sulawesi Utara	674 267 802	650 530 096	729 361 142	889 074 421
25.	Sulawesi Tengah	756 439 213	759 172 265	864 098 666	988 224 643
26.	Sulawesi Selatan	914 502 834	959 942 494	1 106 989 189	1 323 873 981
27.	Sulawesi Tenggara	705 062 822	691 637 811	817 385 234	1 010 575 505
28.	Gorontalo	458 560 308	438 419 416	515 369 177	630 131 541
29.	Sulawesi Barat	482 372 729	456 339 988	512 742 098	663 009 281
30.	M a l u k u	704 206 719	715 451 154	828 272 878	950 038 311
31.	Maluku Utara	612 479 040	604 964 763	691 007 327	820 571 202
32.	Papua Barat	1 030 362 654	1 462 347 938	1 483 865 431	1 690 031 563
33.	P a p u a	1 563 054 901	1 762 534 290	1 893 484 847	2 155 377 790
JUMLAH/ TOTAL		42 598 264 441	47 519 927 639	52 779 890 539	55 062 089 158

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.1

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM TAX SHARES THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	175 323 122	201 970 863	224 636 959	217 900 530
2.	Sumatera Utara	354 949 737	403 523 966	379 382 434	522 223 279
3.	Sumatera Barat	86 636 422	103 327 542	90 617 394	98 589 395
4.	R i a u	407 314 202	555 978 232	465 189 186	459 567 540
5.	J a m b i	133 568 381	157 838 823	165 268 384	152 543 511
6.	Sumatera Selatan	323 125 392	431 004 842	379 632 596	448 922 858
7.	Bengkulu	46 526 570	52 026 355	18 519 664	48 257 592
8.	Lampung	98 328 704	130 179 866	126 734 977	131 582 293
9.	Bangka Belitung	44 007 941	52 057 507	55 995 923	52 365 736
10.	Kepulauan Riau	193 843 308	234 376 006	217 469 127	222 566 530
11.	DKI Jakarta	8 580 181 350	9 398 613 244	8 747 636 170	8 742 013 025
12.	Jawa Barat	939 646 464	1 113 053 612	999 708 518	774 741 041
13.	Jawa Tengah	547 901 611	604 154 702	511 527 047	475 500 000
14.	D I Yogyakarta	73 677 652	87 816 512	75 967 202	74 398 963
15.	Jawa Timur	941 891 859	1 165 084 944	1 110 351 896	1 226 124 388
16.	Banten	351 030 720	416 150 982	341 626 487	355 430 000
17.	B a l i	128 712 266	150 963 833	128 698 319	124 112 775
18.	Nusa Tenggara Barat	65 768 462	112 925 607	131 498 518	138 609 211
19.	Nusa Tenggara Timur	54 842 414	68 647 419	86 798 049	104 385 013
20.	Kalimantan Barat	160 261 092	127 979 083	126 761 996	122 000 000
21.	Kalimantan Tengah	113 202 095	129 086 986	138 131 347	135 480 000
22.	Kalimantan Selatan	116 001 431	142 683 191	133 959 403	135 500 000
23.	Kalimantan Timur	576 616 211	653 810 498	688 989 457	600 000 000
24.	Sulawesi Utara	61 298 807	73 405 246	67 711 925	54 770 000
25.	Sulawesi Tengah	65 468 194	69 360 924	73 268 339	9 482 569
26.	Sulawesi Selatan	197 154 690	217 385 913	230 606 605	271 632 092
27.	Sulawesi Tenggara	53 254 936	64 736 445	64 314 517	86 943 834
28.	Gorontalo	18 683 429	26 766 048	26 066 409	23 901 830
29.	Sulawesi Barat	24 770 036	32 835 423	34 885 738	35 209 966
30.	M a l u k u	55 303 238	72 048 913	75 254 690	78 525 906
31.	Maluku Utara	49 775 494	69 097 630	67 685 366	67 462 302
32.	Papua Barat	167 370 968	184 845 998	193 485 191	170 000 000
33.	P a p u a	203 582 807	252 799 170	269 335 254	316 816 909
JUMLAH/ TOTAL		15 410 020 005	17 556 536 325	16 447 715 087	16 477 559 088

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.2

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMERINTAH
PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM NON TAX SHARES / NATURAL
RESOURCES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. A c e h		837 405 601	118 201 135	1 270 150 474	792 842 760
2. Sumatera Utara		5 257 935	2 317 944	7 162 107	18 903 527
3. Sumatera Barat		7 081 400	5 428 657	1 609 290	4 809 290
4. R i a u		1 299 983 640	2 349 319 803	2 324 772 671	1 987 759 828
5. J a m b i		159 865 020	265 593 366	301 321 322	235 443 809
6. Sumatera Selatan		502 680 051	862 163 718	933 824 103	994 599 986
7. Bengkulu		2 354 812	2 747 881	49 738 995	2 340 747
8. Lampung		62 175 914	107 290 368	124 369 040	90 305 589
9. Bangka Belitung		60 310 388	48 516 961	145 043 626	73 716 955
10. Kepulauan Riau		459 146 269	761 696 229	611 786 301	596 021 520
11. DKI Jakarta		70 654 580	138 995 814	192 163 351	159 536 975
12. Jawa Barat		248 784 940	190 109 609	299 051 801	142 798 650
13. Jawa Tengah		9 771 868	10 411 240	110 692 295	87 462 941
14. D I Yogyakarta		3 521	5 480	6 070 523	4 686
15. Jawa Timur		15 185 200	10 302 953	15 201 655	14 607 768
16. Banten		635 706	863 573	2 300 934	422 000
17. B a l i		0	0	0	0
18. Nusa Tenggara Barat		32 951 518	45 501 002	31 176 098	44 642 101
19. Nusa Tenggara Timur		234 197	263 132	1 036 546	872 762
20. Kalimantan Barat		12 296 934	7 915 306	27 244 775	18 500 000
21. Kalimantan Tengah		45 741 426	51 961 488	97 225 434	62 700 000
22. Kalimantan Selatan		361 576 568	309 529 316	519 483 059	356 600 000
23. Kalimantan Timur		2 523 474 916	3 620 846 163	4 517 251 513	3 687 267 345
24. Sulawesi Utara		1 455 064	904 637	12 650 010	230 000
25. Sulawesi Tengah		1 516 833	1 883 270	9 489 468	33 417 275
26. Sulawesi Selatan		9 076 750	7 003 880	17 738 615	12 527 835
27. Sulawesi Tenggara		5 645 752	7 106 547	18 429 560	19 089 000
28. Gorontalo		205 623	167 648	127 466	81 179
29. Sulawesi Barat		489 187	222 988	416 862	332 674
30. M a l u k u		2 472 684	3 058 590	4 366 535	3 958 251
31. Maluku Utara		20 533 886	30 000 369	31 698 350	12 091 855
32. Papua Barat		198 655 957	649 958 976	549 396 430	580 000 000
33. P a p u a		219 971 330	286 182 154	275 748 035	162 587 267
JUMLAH/ TOTAL		7 177 595 470	9 896 470 197	12 508 737 244	10 196 474 575

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.3

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM GENERAL ALLOCATION
FUNDS THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	509 686 224	621 074 916	716 646 172	911 081 000
2.	Sumatera Utara	761 054 820	812 747 639	948 867 504	1 103 389 237
3.	Sumatera Barat	648 943 012	662 403 385	764 680 895	918 560 365
4.	R i a u	171 850 958	58 869 157	380 051 124	489 179 914
5.	J a m b i	473 505 879	488 743 471	583 882 413	598 882 413
6.	Sumatera Selatan	507 355 883	512 083 577	646 813 301	716 153 261
7.	Bengkulu	487 339 494	523 041 290	607 388 036	775 311 166
8.	Lampung	628 505 673	643 376 134	769 973 038	939 139 287
9.	Bangka Belitung	407 994 844	410 642 308	481 589 915	634 087 815
10.	Kepulauan Riau	403 132 480	310 161 843	395 745 542	460 857 807
11.	DKI Jakarta	0	0	209 909 442	209 909 442
12.	Jawa Barat	984 297 824	1 086 123 940	1 181 553 108	1 269 960 760
13.	Jawa Tengah	1 130 742 601	1 168 787 757	1 276 180 223	1 516 892 951
14.	D I Yogyakarta	523 919 948	527 471 247	620 812 328	757 056 696
15.	Jawa Timur	1 118 478 350	1 212 934 765	1 347 501 699	1 491 561 136
16.	Banten	361 179 087	381 979 019	460 383 683	530 833 000
17.	B a l i	471 788 221	489 942 535	560 673 539	694 079 080
18.	Nusa Tenggara Barat	554 431 964	573 065 430	646 671 083	809 617 715
19.	Nusa Tenggara Timur	652 757 003	674 635 569	752 057 444	940 646 764
20.	Kalimantan Barat	744 834 145	755 123 093	845 483 888	1 023 229 807
21.	Kalimantan Tengah	694 822 206	707 880 493	795 816 335	951 256 068
22.	Kalimantan Selatan	484 059 666	458 074 767	504 876 152	521 822 552
23.	Kalimantan Timur	18 159 327	164 514	51 446 845	52 637 761
24.	Sulawesi Utara	558 634 931	558 781 013	619 711 007	790 534 491
25.	Sulawesi Tengah	629 397 186	659 331 271	743 161 759	902 087 729
26.	Sulawesi Selatan	663 422 394	706 276 399	816 757 969	996 939 584
27.	Sulawesi Tenggara	589 844 134	595 762 419	700 836 557	869 882 871
28.	Gorontalo	388 325 256	400 750 820	461 118 102	582 140 302
29.	Sulawesi Barat	391 060 506	405 749 577	441 578 798	590 680 361
30.	M a l u k u	578 163 797	607 572 176	703 993 953	829 491 474
31.	Maluku Utara	458 511 660	479 480 664	540 389 811	703 159 025
32.	Papua Barat	595 755 729	605 786 464	700 444 910	901 398 453
33.	P a p u a	1 058 227 764	1 148 497 966	1 276 285 908	1 569 782 444
JUMLAH/ TOTAL		18 650 182 966	19 247 315 618	22 553 282 483	27 052 242 731

*) Data APBD

TABEL
TABLE 3.2.4

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT FROM SPECIAL ALLOCATION FUNDS
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	48 189 000	43 415 574	50 611 300	50 413 710
2.	Sumatera Utara	46 303 000	29 137 700	38 485 500	41 628 390
3.	Sumatera Barat	47 179 000	14 415 375	40 733 300	32 500 720
4.	R i a u	0	22 368 500	56 823 400	62 491 370
5.	J a m b i	35 121 000	20 030 000	24 735 600	32 673 320
6.	Sumatera Selatan	0	17 807 100	32 287 000	45 401 430
7.	Bengkulu	53 277 000	20 983 900	36 609 600	28 620 610
8.	Lampung	40 016 000	27 573 800	42 210 200	31 087 640
9.	Bangka Belitung	45 563 000	8 071 800	17 880 900	25 135 650
10.	Kepulauan Riau	20 931 000	4 558 900	21 903 200	23 165 600
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	0	38 570 300	45 764 600	48 356 280
13.	Jawa Tengah	3 437 000	28 304 250	51 789 800	50 630 450
14.	D I Yogyakarta	33 410 000	11 384 100	19 489 600	19 052 740
15.	Jawa Timur	18 001 000	56 982 200	55 031 200	52 787 680
16.	Banten	32 121 000	13 660 600	45 179 600	29 687 000
17.	B a l i	36 108 000	8 351 325	15 916 275	34 025 910
18.	Nusa Tenggara Barat	48 024 000	24 764 400	45 964 400	53 326 340
19.	Nusa Tenggara Timur	59 733 000	30 249 498	47 399 400	57 088 950
20.	Kalimantan Barat	53 314 000	29 618 800	38 369 500	43 913 040
21.	Kalimantan Tengah	59 296 000	32 296 200	51 915 000	50 184 280
22.	Kalimantan Selatan	43 352 000	19 837 300	37 246 400	25 000 000
23.	Kalimantan Timur	3 811 000	33 643 200	38 188 100	52 890 894
24.	Sulawesi Utara	52 879 000	17 439 200	29 288 200	43 539 930
25.	Sulawesi Tengah	60 057 000	28 596 800	38 179 100	43 237 070
26.	Sulawesi Selatan	44 849 000	29 276 302	41 886 000	42 774 470
27.	Sulawesi Tenggara	56 318 000	24 032 400	33 804 600	34 659 800
28.	Gorontalo	51 346 000	10 734 900	28 057 200	24 008 230
29.	Sulawesi Barat	66 053 000	17 532 000	35 860 700	36 786 280
30.	M a l u k u	68 267 000	32 771 475	44 657 700	38 062 680
31.	Maluku Utara	83 658 000	26 386 100	51 233 800	37 858 020
32.	Papua Barat	68 580 000	21 756 500	40 538 900	38 633 110
33.	P a p u a	81 273 000	75 055 000	72 115 650	106 191 170
JUMLAH/ TOTAL		1 360 466 000	819 605 499	1 270 155 725	1 335 812 764

*) Data APBD

TABEL 3.3
TABLE

REALISASI PENDAPATAN LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL OTHER LEGAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 736 658 043	5 186 203 171	4 545 435 067	5 938 284 934
2.	Sumatera Utara	28 919 884	83 128 574	6 122 275	1 619 965 360
3.	Sumatera Barat	496 654 238	128 575 477	26 216 547	578 415 210
4.	R i a u	350 550	21 044 175	3 473 322	664 273 709
5.	J a m b i	25 398 107	21 350 836	19 366 614	1 199 910
6.	Sumatera Selatan	10 191 705	30 016 490	122 308 054	834 420 720
7.	Bengkulu	37 078 530	50 969 719	13 797 738	208 628 921
8.	Lampung	53 002 723	64 923 055	69 027 926	17 362 000
9.	Bangka Belitung	169 125	614 512	33 778 571	179 132 080
10.	Kepulauan Riau	0	20 790 151	9 073 500	163 289 580
11.	DKI Jakarta	0	596 385 753	1 321 665 225	2 846 284 911
12.	Jawa Barat	35 571 977	62 087 407	25 138 406	4 214 284 758
13.	Jawa Tengah	4 071 261	29 525 813	33 247 287	2 903 302 621
14.	D I Yogyakarta	9 910 813	7 325 681	15 458 293	284 778 165
15.	Jawa Timur	26 108 069	56 709 808	66 672 450	2 874 234 340
16.	Banten	3 408 242	5 197 014	10 554 077	4 150 000
17.	B a l i	101 671 504	194 719 389	233 171 247	646 157 053
18.	Nusa Tenggara Barat	341 325	620 663	92 749 975	473 894 400
19.	Nusa Tenggara Timur	264 450	16 121 504	45 350 000	714 538 400
20.	Kalimantan Barat	27 608 888	81 047 836	83 900 826	516 378 430
21.	Kalimantan Tengah	72 330 000	129 983 728	23 611 982	342 538 031
22.	Kalimantan Selatan	82 964 868	63 393 123	83 882 074	45 079 570
23.	Kalimantan Timur	18 555 695	21 276 953	20 013 984	414 013 100
24.	Sulawesi Utara	17 997 818	89 403 592	101 256 327	278 841 044
25.	Sulawesi Tengah	20 702 188	6 640 493	26 520 527	324 047 150
26.	Sulawesi Selatan	18 481 139	58 543 732	44 061 750	928 800 890
27.	Sulawesi Tenggara	102 528 828	24 175 000	125 424 663	302 869 350
28.	Gorontalo	0	21 848 025	24 123 537	121 630 890
29.	Sulawesi Barat	7 422 829	63 830 540	91 818 081	154 014 980
30.	M a l u k u	158 334 281	67 640 701	88 032 346	218 581 870
31.	Maluku Utara	0	13 021 032	160 973 154	210 813 010
32.	Papua Barat	1 718 613 750	1 819 680 723	2 063 854 826	2 068 850 276
33.	P a p u a	4 080 040 325	3 519 176 626	3 970 959 548	4 736 663 156
JUMLAH/ TOTAL		10 895 351 155	12 555 971 296	13 601 040 199	35 829 718 819

*) Data APBD

TABEL 3.B
TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL FINANCING RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA
(thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	4 015 380 289	1 842 988 678	1 306 726 214	804 130 756
2.	Sumatera Utara	610 590 952	346 533 462	404 884 723	700 027 786
3.	Sumatera Barat	314 029 282	673 887 321	335 221 212	275 605 000
4.	R i a u	871 076 872	114 587 470	421 520 453	953 880 000
5.	J a m b i	386 301 605	201 204 877	353 260 385	208 201 282
6.	Sumatera Selatan	288 684 451	315 250 644	390 314 822	213 204 322
7.	Bengkulu	218 702 463	10 570 146	39 678 718	43 697 745
8.	Lampung	183 672 386	79 029 066	161 181 629	43 500 000
9.	Bangka Belitung	315 545 870	264 129 736	240 432 353	75 000 000
10.	Kepulauan Riau	391 953 213	242 173 799	375 005 362	373 080 186
11.	DKI Jakarta	4 446 373 058	3 748 512 147	4 926 078 266	5 380 600 504
12.	Jawa Barat	2 457 196 766	1 789 756 684	2 449 742 872	1 570 802 796
13.	Jawa Tengah	683 817 617	904 356 288	1 239 075 792	562 000 000
14.	D I Yogyakarta	285 824 679	256 568 355	254 231 964	221 415 561
15.	Jawa Timur	2 061 246 529	1 995 753 452	1 564 783 382	1 044 555 318
16.	Banten	237 720 327	235 495 508	535 848 290	264 000 000
17.	B a l i	468 108 450	538 452 871	704 385 153	456 882 514
18.	Nusa Tenggara Barat	63 928 652	73 514 841	17 280 030	62 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	268 175 864	224 112 521	120 234 844	30 000 000
20.	Kalimantan Barat	222 153 924	173 009 098	231 734 083	115 000 000
21.	Kalimantan Tengah	145 923 582	57 885 383	132 100 592	25 000 000
22.	Kalimantan Selatan	549 419 700	492 660 308	324 878 615	190 500 000
23.	Kalimantan Timur	2 007 208 728	808 568 904	1 652 437 549	1 500 000 000
24.	Sulawesi Utara	399 104 168	347 025 574	109 273 479	100 698 691
25.	Sulawesi Tengah	189 511 577	177 052 220	220 705 398	158 092 727
26.	Sulawesi Selatan	183 706 090	230 448 199	290 514 746	159 571 791
27.	Sulawesi Tenggara	124 465 203	106 197 607	198 733 017	180 696 000
28.	Gorontalo	123 276 331	65 070 534	96 844 215	60 000 000
29.	Sulawesi Barat	59 884 225	23 221 030	25 751 453	19 000 000
30.	M a l u k u	64 679 783	58 385 591	55 485 451	22 680 003
31.	Maluku Utara	81 106 646	2 872 955	15 732 309	145 000 000
32.	Papua Barat	49 003 746	129 160 000	353 183 633	130 000 000
33.	P a p u a	225 000 000	142 102 552	955 938 778	75 000 000
JUMLAH/ TOTAL		22 992 773 028	16 670 537 821	20 503 199 782	16 163 822 982

*) Data APBD

TABEL

TABLE 4.

<http://www.bps.go.id>

TABEL
TABLE 4

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		48 150 149 337	53 152 485 827	66 590 354 071	96 516 976 407
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	18 451 835 442	20 692 837 531	24 825 623 272	29 025 698 194
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	10 585 697	9 167 475	14 724 999	41 467 473
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	116 478 816	64 605 959	39 552 236	56 244 656
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	2 950 402 234	4 428 118 542	7 368 705 579	29 728 023 453
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	4 264 280 761	3 627 404 487	4 007 604 216	1 829 598 332
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	11 977 153 663	13 627 990 091	17 300 751 767	18 522 533 257
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	10 182 621 399	10 552 027 515	12 842 293 763	16 421 768 566
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	196 791 325	150 334 227	191 098 239	891 642 476
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		53 734 476 550	59 000 922 032	65 627 357 161	80 438 333 224
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	6 075 451 038	6 669 635 011	5 637 664 281	6 510 988 072
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	23 412 329 896	26 992 274 147	33 656 718 936	42 092 662 740
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	24 246 695 616	25 339 012 874	26 332 973 944	31 834 682 412
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		20 008 181 602	21 319 618 627	28 286 729 646	5 170 915 423
JUMLAH/ TOTAL		121 892 807 489	133 473 026 486	160 504 440 878	182 126 225 054

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.1

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		2 198 662 228	2 361 186 746	2 527 577 357	3 646 912 385
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	672 820 728	740 542 103	811 497 925	888 419 643
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	6 873 157	598 869	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	433 398 506	532 841 778	614 246 212	1 146 032 585
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	669 645 983	768 357 850	611 421 678	594 341 157
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	313 843 984	312 466 642	236 584 907	271 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	100 000 000	0	204 184 835	597 119 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 079 870	6 379 504	49 641 800	150 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		5 444 184 777	5 167 329 622	4 847 047 931	5 865 026 304
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	288 692 582	295 570 080	252 925 171	325 975 208
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 459 188 116	1 603 848 155	3 120 139 312	4 538 991 461
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	3 696 304 079	3 267 911 387	1 473 983 448	1 000 059 635
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		2 415 001 063	1 282 287 393	1 542 421 072	7 000 000
JUMLAH/ TOTAL		10 057 848 068	8 810 803 761	8 917 046 360	9 518 938 689

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.2

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		2 066 194 068	1 991 472 765	2 339 178 887	5 022 928 596
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	646 246 722	679 253 395	758 989 636	701 655 367
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	34 172	25 888	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	125 559 525	316 329 250	307 507 090	2 085 111 202
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	215 176 817	71 955 050	44 335 343	89 519 700
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	656 050 047	609 775 367	801 034 520	714 259 949
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	420 526 785	313 433 815	427 157 798	1 422 382 378
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 600 000	700 000	154 500	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 378 366 514	1 675 233 409	2 272 298 276	2 654 923 781
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	161 214 215	138 095 739	156 928 569	189 769 143
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	512 815 247	820 332 048	1 052 132 331	1 556 120 871
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	704 337 052	716 805 622	1 063 237 376	909 033 767
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		378 589 070	565 463 428	751 889 462	354 712 416
JUMLAH/ TOTAL		3 823 149 652	4 232 169 602	5 363 366 625	8 032 564 793

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.3

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		769 822 721	1 031 743 732	1 150 643 751	1 688 938 887
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	396 240 062	452 838 728	532 674 804	564 315 243
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	16 760 000	56 700 222	44 217 000	692 218 294
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	29 514 325	55 567 604	95 346 158	9 157 545
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	266 352 364	290 666 129	402 995 188	406 556 947
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	58 531 460	172 924 980	68 280 083	10 253 900
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 424 510	3 046 069	7 130 518	6 436 958
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		887 581 198	1 208 009 760	1 178 121 323	1 432 228 336
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	66 105 352	79 094 896	90 591 859	98 835 282
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	359 444 050	545 847 300	493 293 534	607 505 613
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	462 031 796	583 067 564	594 235 930	725 887 441
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		682 866 528	355 105 212	77 617 334	72 293 000
JUMLAH/ TOTAL		2 340 270 447	2 594 858 704	2 406 382 408	3 193 460 223

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.4

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 640 706 475	1 633 624 557	1 726 941 928	3 221 363 309
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	621 727 937	740 029 953	701 024 526	818 720 959
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	11 033 095	15 272 310	0	14 172 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	144 952 300	148 675 000	230 628 149	1 594 014 180
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	257 669 138	216 582 000	197 806 681	26 427 500
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	530 344 005	459 865 294	511 015 529	593 344 670
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	73 880 000	43 200 000	86 365 493	163 907 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 100 000	10 000 000	101 550	10 777 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 116 774 369	2 633 808 101	2 538 187 733	3 145 292 773
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	288 674 411	330 284 401	235 117 018	253 419 144
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	708 706 089	882 439 925	960 890 615	1 342 392 563
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 119 393 869	1 421 083 775	1 342 180 100	1 549 481 066
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		345 508 122	194 000 000	1 596 831 277	75 000 000
JUMLAH/ TOTAL		4 102 988 966	4 461 432 658	5 861 960 938	6 441 656 082

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.5

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		685 176 280	672 267 047	760 339 472	802 376 084
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	326 068 007	336 141 292	386 627 385	427 729 484
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	8 688 823	130 000	135 000	92 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	7 438 278	64 358 881	22 187 375	23 549 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	22 222 754	37 191 082	56 918 574	4 235 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	172 865 736	222 916 085	291 345 988	231 383 150
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	145 217 847	9 900 000	0	105 387 450
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 674 835	1 629 707	3 125 150	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		844 896 912	815 863 303	989 902 384	1 140 127 473
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	50 985 048	53 961 942	68 132 244	83 046 360
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	348 230 502	296 041 040	403 019 557	562 162 059
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	445 681 362	465 860 321	518 750 583	494 919 054
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		210 128 877	353 260 385	681 825 442	0
JUMLAH/ TOTAL		1 740 202 069	1 841 390 735	2 432 067 298	1 942 503 557

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.6

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 048 976 962	1 167 117 282	2 007 450 230	2 835 367 647
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	428 505 801	439 708 921	594 719 564	664 211 762
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	1 217 160	2 606 945
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	51 422 977	81 473 375	523 331 096	1 171 590 039
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	48 972 750	49 205 523	54 575 151	507 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	377 068 040	478 165 062	373 395 018	500 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	142 441 358	117 977 676	459 523 741	488 766 248
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	566 036	586 725	688 500	7 685 653
B. BELANJA LANGSUNG		1 292 350 129	1 940 919 350	1 798 629 605	1 907 084 625
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	302 708 009	476 970 696	107 182 811	64 708 756
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	348 977 879	430 678 144	552 326 637	830 586 449
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	640 664 241	1 033 270 510	1 139 120 157	1 011 789 420
C. PEMBIAYAAN DAERAH		345 043 084	431 373 607	548 219 953	409 900 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		2 686 370 175	3 539 410 239	4 354 299 788	5 152 352 272

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.7

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		393 018 762	521 635 607	494 038 124	812 535 037
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	207 914 247	329 366 252	364 245 284	424 252 801
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	28 124 859	61 461 173	19 369 140	234 409 520
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	147 513 000	20 358 540	9 608 034	944 798
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	99 105 386	100 815 666	138 032 451
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	3 000 000	3 944 789	0	2 959 202
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	6 466 656	7 399 467	0	11 936 265
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		539 471 542	449 562 954	515 176 929	773 619 892
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	75 619 091	44 005 108	56 696 707	72 556 956
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	214 738 228	240 495 882	237 590 663	379 452 730
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	249 114 223	165 061 964	220 889 559	321 610 206
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		200 570 145	40 232 218	197 445 911	0
JUMLAH/ TOTAL		1 133 060 449	1 011 430 779	1 206 660 964	1 586 154 929

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.8

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 053 357 172	968 441 248	1 143 029 305	1 044 931 071
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	386 715 733	416 719 262	441 136 156	529 515 294
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	32 877 000	38 365 623	35 896 755	3 950 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	111 879 041	89 264 670	110 677 874	16 650 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	407 169 916	378 733 817	406 965 252	286 430 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	23 157 821	18 000 000	113 366 500	186 500 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	91 557 661	27 357 876	34 986 768	21 885 777
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		793 750 676	1 036 457 939	1 423 049 501	1 793 318 874
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	73 709 559	84 733 817	107 811 859	126 130 602
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	486 751 068	525 914 922	683 987 620	909 604 793
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	233 290 049	425 809 200	631 250 022	757 583 479
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		78 951 378	165 814 010	123 093 725	15 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 926 059 226	2 170 713 197	2 689 172 531	2 853 249 945

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.9

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		447 618 758	379 877 151	496 255 478	837 610 056
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	129 529 038	151 693 153	191 385 033	251 752 101
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	993 561	1 251 750	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	156 610 562	26 406 951	65 764 441	213 682 016
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	28 700 827	17 946 771	21 922 054	4 367 505
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	106 455 806	115 637 811	132 893 987	205 183 591
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	24 828 964	66 041 565	84 289 963	156 888 054
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	500 000	899 150	0	5 736 789
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		406 635 485	482 838 623	680 428 338	612 409 203
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	41 743 919	33 420 443	36 150 068	51 362 273
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	126 756 627	136 056 175	156 720 935	238 481 111
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	238 134 939	313 362 005	487 557 335	322 565 819
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		266 136 770	249 439 075	257 245 782	10 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 120 391 013	1 112 154 849	1 433 929 598	1 460 019 259

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.10

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		478 816 048	525 340 406	861 648 228	1 016 146 731
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	176 695 579	162 989 135	192 313 329	206 254 531
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	47 932 814	114 556 707	82 918 650	281 946 200
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	72 112 807	74 480 407	189 914 670	97 445 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	175 274 848	164 514 157	255 569 138	250 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	5 000 000	8 500 000	140 932 441	179 501 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 800 000	300 000	0	1 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 369 537 165	1 198 234 307	1 085 945 217	1 371 642 847
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	219 272 896	179 428 467	140 004 976	178 689 711
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	426 505 931	367 237 269	686 032 380	859 241 265
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	723 758 338	651 568 571	259 907 861	333 711 871
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		2 600 000	372 188 859	304 291 009	23 500 000
JUMLAH/ TOTAL		1 850 953 213	2 095 763 572	2 251 884 454	2 411 289 578

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.11

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		6 248 430 051	6 972 751 160	9 627 347 327	11 507 408 929
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	5 874 593 713	6 513 005 171	8 757 472 026	10 043 911 142
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	9 943 209	7 421 194	4 353 525	4 353 828
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	305 274 309	423 468 762	825 595 987	1 367 244 871
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	58 020 461	27 517 450	38 587 206	31 190 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	0	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	598 359	1 338 583	1 338 583	1 350 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	0	59 359 088
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		13 251 881 680	14 580 144 679	16 796 334 862	22 319 622 721
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 672 843 080	2 024 843 081	1 138 088 013	1 362 027 558
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	6 773 237 465	7 312 154 901	8 341 913 514	10 013 188 999
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	4 805 801 135	5 243 146 697	7 316 333 335	10 944 406 164
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		4 197 955 215	5 221 603 301	6 799 757 252	2 196 313 207
JUMLAH/ TOTAL		23 698 266 946	26 774 499 140	33 223 439 441	36 023 344 857

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.12

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		5 691 756 883	6 265 732 992	7 606 879 466	12 410 127 669
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 001 707 347	1 380 786 123	1 442 284 168	1 650 063 345
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	10 394 197	12 194 120	8 962 780	10 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	120 587 340	156 022 746	814 847 123	4 851 632 374
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	232 864 154	192 865 500	491 978 475	13 335 312
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	2 075 846 644	2 064 745 161	2 720 212 920	2 715 593 796
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	2 250 355 551	2 458 555 862	2 127 594 000	2 995 624 196
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 650	563 480	1 000 000	173 878 646
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 501 857 027	2 754 875 029	2 688 690 379	3 394 169 310
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	356 753 290	255 873 493	317 690 461	358 041 375
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 418 622 576	1 443 464 795	1 652 349 083	1 751 553 738
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	726 481 161	1 055 536 741	718 650 835	1 284 574 197
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		2 049 472 840	2 511 336 444	3 208 032 615	393 000 000
JUMLAH/ TOTAL		10 243 086 750	11 531 944 465	13 503 602 460	16 197 296 979

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.13

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		3 212 099 612	3 796 513 884	5 259 700 529	8 298 693 582
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	941 583 100	1 069 384 503	1 141 188 386	1 252 522 824
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	67 953 604	68 261 172	104 349 805	3 245 139 123
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	401 255 901	344 916 345	385 841 980	7 372 500
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 108 957 859	1 182 878 413	1 694 471 481	1 876 986 401
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	687 190 390	1 116 008 176	1 931 020 531	1 886 672 734
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5 158 758	15 065 275	2 828 346	30 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 988 013 501	2 171 519 886	2 517 005 298	2 947 050 711
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	213 820 985	209 968 578	240 493 048	338 586 899
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 227 133 928	1 542 074 984	1 812 185 242	1 946 778 445
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	547 058 588	419 476 324	464 327 008	661 685 367
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 180 364 556	1 562 639 507	1 010 039 769	150 000 000
JUMLAH/ TOTAL		6 380 477 669	7 530 673 277	8 786 745 596	11 395 744 293

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.14

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		696 922 383	788 491 846	665 763 670	1 267 028 063
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	310 260 956	335 693 916	387 412 234	490 659 484
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	45 778	19 464	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	15 550 887	89 895 292	17 578 562	355 793 657
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	96 290 500	88 513 100	114 820 605	95 736 448
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	198 385 862	214 667 402	0	251 788 474
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	76 388 400	56 967 000	145 929 020	53 050 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	2 735 672	23 249	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		630 565 465	566 102 212	628 457 725	857 260 646
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	86 714 402	98 929 829	111 340 357	111 505 041
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	350 913 012	339 709 271	374 323 535	527 796 940
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	192 938 051	127 463 112	142 793 833	217 958 665
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		244 404 316	276 179 393	564 921 400	32 574 600
JUMLAH/ TOTAL		1 571 892 164	1 630 773 451	1 859 142 795	2 156 863 309

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.15

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		4 318 899 232	5 869 745 632	6 589 867 568	9 436 506 403
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 075 189 346	1 283 591 782	1 407 956 634	1 668 623 320
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	296 036	167 634	4 422 499	6 139 012
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	540 816 992	682 406 822	1 121 554 739	3 895 673 765
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	72 471 414	47 627 536	99 096 200	31 358 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	1 883 301 032	2 326 860 423	2 674 049 069	2 292 840 281
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	746 137 792	1 503 834 280	1 237 764 963	1 490 172 025
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	686 620	25 257 155	45 023 464	51 700 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		3 283 139 576	4 336 571 471	5 096 053 104	5 717 182 698
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	483 186 941	668 598 067	895 165 704	969 382 980
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 962 652 643	2 790 096 474	3 155 525 486	3 685 777 302
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	837 299 992	877 876 930	1 045 361 914	1 062 022 416
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		2 286 902 536	1 769 981 099	1 372 238 293	618 341 577
JUMLAH/ TOTAL		9 888 941 344	11 976 298 202	13 058 158 965	15 772 030 678

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.16

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 173 761 522	1 304 622 476	2 081 522 312	2 039 583 000
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	294 424 404	280 475 124	320 486 551	367 476 000
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	57 693 815	92 374 984	349 780 525	289 420 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	48 116 100	51 428 250	79 829 561	28 750 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	581 405 598	736 769 053	1 016 068 937	983 951 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	190 121 605	139 455 065	315 290 000	364 986 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 000 000	4 120 000	66 738	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		1 247 059 419	1 529 948 052	1 819 695 803	2 094 492 000
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	106 741 193	110 267 532	129 669 563	142 946 249
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	457 752 098	593 057 823	972 617 438	916 577 300
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	682 566 128	826 622 697	717 408 802	1 034 968 451
C. PEMBIAYAAN DAERAH		252 995 508	540 362 606	390 244 507	32 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		2 673 816 449	3 374 933 134	4 291 462 622	4 166 075 000

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.17

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 290 952 454	1 496 158 141	1 796 767 358	2 372 921 202
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	427 346 486	465 179 737	521 535 198	779 639 484
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4 509 360	4 479 600	3 999 840	4 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	15 637 208	190 010 205	226 902 827	744 942 853
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	305 087 740	313 295 312	361 339 672	27 957 760
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	453 053 519	485 833 043	640 351 377	680 261 435
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	79 755 937	24 486 688	33 256 221	106 699 649
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5 562 204	12 873 556	9 382 223	29 420 021
B. BELANJA LANGSUNG		520 146 882	489 691 916	768 034 137	1 283 712 033
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	35 605 364	18 489 741	31 609 717	53 454 514
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	277 484 606	269 734 074	509 304 627	772 160 232
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	207 056 912	201 468 101	227 119 793	458 097 287
C. PEMBIAYAAN DAERAH		559 236 657	790 310 153	801 660 774	50 000 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		2 370 335 993	2 776 160 210	3 366 462 269	3 706 633 235

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.18

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		724 553 299	859 304 825	886 085 265	1 399 169 475
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	357 906 776	385 403 837	426 228 699	476 970 431
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	6 542 700	4 929 176	2 994 069	250 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	29 666 258	116 432 115	138 283 581	569 794 120
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	84 700 290	96 006 383	99 291 085	92 984 393
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	164 138 371	201 232 154	176 666 844	180 501 621
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	80 725 984	53 986 075	40 632 980	68 668 910
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	872 920	1 315 085	1 988 007	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		375 984 593	416 441 760	764 516 010	855 387 669
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	45 188 420	55 334 233	37 987 372	74 646 947
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	196 983 101	216 550 122	276 464 886	390 365 043
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	133 813 072	144 557 405	450 063 752	390 375 679
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		136 896 845	69 986 315	56 030 004	49 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 237 434 737	1 345 732 900	1 706 631 279	2 303 557 144

*) Data APBD

TABEL
TABLE

4.19

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR
BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		492 812 023	538 353 060	572 612 934	1 452 137 269
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	301 120 938	330 954 210	403 101 909	476 859 775
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	4 788 548	6 819 140	6 747 249	796 088 400
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	46 753 319	49 739 498	65 081 292	52 421 990
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	74 459 462	96 124 597	88 049 947	100 954 604
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	59 684 237	46 618 785	8 792 886	15 812 500
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	6 005 519	8 096 830	839 651	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		532 633 795	609 729 330	659 269 779	695 217 394
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	45 453 468	60 105 893	71 725 069	106 796 297
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	281 930 798	373 064 516	392 209 058	382 864 996
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	205 249 529	176 558 921	195 335 652	205 556 101
C. PEMBIAYAAN DAERAH		266 235 727	164 101 590	212 822 303	89 824 000
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		1 291 681 545	1 312 183 980	1 444 705 016	2 237 178 663

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.20

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		750 990 445	774 185 007	930 490 053	1 699 268 452
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	329 735 284	346 501 098	390 996 533	468 814 010
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	35 712 500	50 451 332	76 363 000	756 132 155
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	20 806 946	8 820 600	14 225 000	1 125 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	218 142 029	237 066 027	290 528 444	328 825 354
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	146 523 985	129 787 680	158 377 076	139 371 933
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	69 701	1 558 270	0	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		876 021 859	926 017 322	1 065 833 493	1 203 140 401
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	61 145 490	58 641 977	76 343 884	86 243 560
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	450 379 483	490 478 825	570 405 689	736 942 729
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	364 496 886	376 896 520	419 083 920	379 954 112
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		173 032 329	251 734 083	437 627 574	50 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 800 044 633	1 951 936 412	2 433 951 120	2 952 408 853

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.21

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		496 250 002	622 766 793	712 053 813	1 247 605 983
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	248 296 583	252 238 309	294 770 418	379 867 633
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	16 721 050	20 623 607	20 580 943	20 623 711
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	13 646 758	106 724 002	21 500 735	355 962 924
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	35 149 721	40 211 363	82 097 684	133 933 252
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	167 793 818	182 468 533	248 637 425	272 896 216
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	14 491 572	18 927 354	42 852 965	47 865 001
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	150 500	1 573 625	1 613 643	36 457 246
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		975 028 246	854 581 382	812 290 457	1 001 138 221
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	56 373 955	60 521 483	64 050 675	70 195 990
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	291 817 269	252 766 611	315 899 790	419 564 314
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	626 837 022	541 293 288	432 339 992	511 377 917
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		42 057 470	135 963 494	529 701 185	28 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 513 335 718	1 613 311 669	2 054 045 455	2 276 744 204

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.22

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		962 700 759	1 142 533 972	1 195 209 614	1 803 998 516
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	371 228 225	422 266 361	481 313 704	572 223 384
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	37 126	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	33 257 670	98 645 652	62 913 943	71 792 090
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	110 089 207	100 762 508	78 488 029	36 096 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	402 276 473	500 000 000	544 807 040	1 108 087 042
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	43 720 897	18 650 302	25 948 829	11 100 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 091 161	2 209 149	1 738 069	4 700 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 142 592 296	1 267 561 372	1 270 524 101	1 304 945 113
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	78 666 387	97 580 931	108 353 995	115 588 258
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	437 269 809	492 679 168	565 324 723	662 465 003
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	626 656 100	677 301 273	596 845 383	526 891 852
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		553 537 508	362 341 273	1 007 187 782	48 500 000
JUMLAH/ TOTAL		2 658 830 563	2 772 436 617	3 472 921 497	3 157 443 629

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.23

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		3 323 786 647	2 936 791 901	4 679 991 711	5 163 915 007
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	356 634 431	405 321 821	697 747 236	908 136 950
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	410 142 815	356 170 000	683 777 651	740 588 100
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	189 786 674	103 863 200	130 812 760	115 780 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	716 581 090	901 354 888	1 863 896 580	1 851 972 500
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 650 627 262	1 170 081 992	1 303 592 971	1 537 437 457
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	14 375	0	164 513	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 985 472 214	2 981 776 194	3 463 280 908	5 338 698 093
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	416 481 970	472 870 254	279 925 762	355 777 197
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	705 567 895	854 936 271	1 407 152 366	2 296 981 573
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 863 422 349	1 653 969 669	1 776 202 780	2 685 939 323
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		1 046 876 135	1 934 557 684	3 326 264 857	100 000 000
JUMLAH/ TOTAL		7 356 134 996	7 853 125 779	11 469 537 476	10 602 613 100

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.24

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		518 508 871	632 041 039	626 908 175	1 038 759 753
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	296 788 691	328 811 980	368 886 616	486 752 016
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	22 057 250	114 013 707	39 085 000	300 727 737
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	54 721 180	46 816 745	29 553 813	35 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	136 687 892	137 100 431	187 539 904	205 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	6 000 000	4 000 000	1 043 603	1 280 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 253 858	1 298 176	799 239	10 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		515 919 011	505 382 406	658 956 657	779 209 289
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	38 377 867	48 481 823	55 670 172	54 819 105
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	236 257 494	292 540 520	369 656 152	372 854 645
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	241 283 650	164 360 063	233 630 333	351 535 539
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		388 025 574	368 273 478	189 114 091	0
JUMLAH/ TOTAL		1 422 453 456	1 505 696 923	1 474 978 923	1 817 969 042

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.25

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		467 376 968	504 698 487	698 081 241	999 793 464
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	258 665 067	291 205 304	329 217 099	381 417 256
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	34 174 084	58 608 736	107 750 566	352 022 150
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	16 407 712	13 923 701	13 158 770	7 250 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	112 284 226	93 456 633	179 200 037	210 911 203
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	45 845 879	47 504 113	66 280 191	41 492 855
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	2 474 578	6 700 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		592 355 452	622 558 234	728 001 093	931 405 951
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	58 952 351	59 207 689	75 293 666	105 305 837
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	321 587 887	359 558 245	444 210 633	526 875 773
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	211 815 214	203 792 300	208 496 794	299 224 341
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		182 111 792	227 405 397	205 216 673	6 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 241 844 212	1 354 662 118	1 631 299 007	1 937 199 415

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.26

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 236 898 965	1 500 511 910	1 820 969 739	3 376 343 378
INDIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	481 693 704	500 173 240	609 703 853	738 275 728
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	229 376	146 029	65 198	50 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	79 196 000	97 116 152	1 232 930 890
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	73 519 402	25 016 900	19 510 370	5 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	362 740 344	503 954 303	630 352 515	784 594 173
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	318 120 459	389 647 141	463 265 651	550 492 587
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	595 680	2 378 297	956 000	65 000 000
B. BELANJA LANGSUNG		885 292 826	985 647 855	1 356 073 571	1 384 598 687
DIRECT EXPENDITURE					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	121 502 604	122 037 635	146 363 314	161 556 260
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	467 927 554	559 961 996	742 024 940	859 237 928
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	295 862 668	303 648 224	467 685 317	363 804 499
C. PEMBIAYAAN DAERAH		237 264 440	308 364 369	224 038 277	0
LOCAL GOVERNMENT FINANCING					
JUMLAH/ TOTAL		2 359 456 231	2 794 524 134	3 401 081 587	4 760 942 065

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.27

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		446 271 525	597 811 705	699 679 828	1 270 086 088
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	286 532 407	312 193 785	346 075 531	468 384 606
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	29 090 088
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	17 724 952	7 860 207	9 616 003	377 619 350
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	10 019 035	75 477 400	18 176 488	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	60 160 658	79 660 625	73 047 479	104 260 189
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	70 729 017	120 671 756	250 939 327	262 928 740
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 105 456	1 947 932	1 825 000	27 803 115
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		673 428 860	527 876 246	628 344 872	751 620 482
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	111 288 327	64 253 626	62 281 697	64 607 470
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	260 377 147	228 258 763	224 565 348	290 011 851
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	301 763 386	235 363 857	341 497 827	397 001 161
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		35 484 949	35 683 286	159 688 045	5 000 000
JUMLAH/ TOTAL		1 155 185 334	1 161 371 237	1 487 712 745	2 026 706 570

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.28

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		209 993 413	258 083 469	323 980 000	466 587 095
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	136 588 902	165 232 594	187 796 432	238 269 991
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	8 755 602	1 928 000	1 662 444	4 500 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	14 694 719	16 142 400	66 763 216	143 330 890
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	2 992 240	4 266 797	6 965 536	5 600 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	38 157 153	39 430 333	51 024 380	54 676 214
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	8 554 797	30 930 988	8 098 192	15 210 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	250 000	152 357	1 669 800	5 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		409 334 481	308 996 973	400 548 423	471 814 732
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	24 664 746	21 769 939	27 894 843	36 290 327
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	206 395 928	178 230 008	225 445 501	288 109 219
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	178 273 807	108 997 026	147 208 079	147 415 186
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		65 134 763	91 405 185	69 891 823	35 000 000
JUMLAH/ TOTAL		684 462 657	658 485 627	794 420 246	973 401 827

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.29

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		103 782 681	125 638 652	207 595 524	395 774 452
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	65 104 705	77 197 534	99 184 433	155 974 247
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	2 091 514	700 000	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	5 593 400	10 568 975	65 619 895	169 823 255
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	8 476 557	6 814 352	4 384 472	12 826 950
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	22 054 524	29 262 966	35 104 574	45 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	0	3 011 500	8 650 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	461 981	1 094 825	290 650	3 500 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		486 381 131	482 033 514	523 772 291	573 234 378
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	45 749 520	56 863 864	60 784 227	78 686 067
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	198 827 504	220 105 790	232 296 315	346 020 186
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	241 804 107	205 063 860	230 691 749	148 528 125
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		23 960 693	25 926 974	13 254 702	2 000 000
JUMLAH/ TOTAL		614 124 505	633 599 140	744 622 517	971 008 830

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.30

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		384 430 188	378 672 694	426 861 315	849 583 191
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	226 880 039	265 114 043	288 445 809	386 442 693
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	1 387 266	5 883 777	1 834 545
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	39 875 757	2 498 527	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	24 566 104	22 417 069	20 292 109	315 975 312
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	35 648 605	23 821 897	26 361 523	5 530 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	44 793 866	60 881 792	59 843 044	91 801 319
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	4 052 260	966 655	7 668 832	27 999 322
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	8 613 557	1 585 445	18 366 221	20 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		631 377 457	571 608 481	683 060 114	580 287 070
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	74 958 073	54 342 524	75 806 228	62 153 073
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	384 271 757	358 404 729	352 314 914	362 832 700
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	172 147 627	158 861 228	254 938 972	155 301 297
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		57 602 183	60 765 218	83 751 369	4 987 135
JUMLAH/ TOTAL		1 073 409 828	1 011 046 393	1 193 672 798	1 434 857 396

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.31

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND
OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		233 270 452	242 969 257	235 889 454	447 217 364
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	143 280 152	163 837 449	154 479 487	206 467 693
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	11 709 420	11 381 334	2 347 000	178 963 010
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	55 743 894	36 025 107	39 178 677	22 550 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	21 596 986	31 225 367	37 742 597	34 336 661
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	0	0	900 000	900 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	940 000	500 000	1 241 693	4 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		526 245 692	439 753 927	488 485 594	722 815 553
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	63 777 116	39 362 004	51 878 753	50 303 050
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	209 412 283	207 866 680	248 539 893	333 185 500
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	253 056 293	192 525 243	188 066 948	339 327 003
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		7 361 950	15 978 309	228 149 330	100 000 000
JUMLAH/ TOTAL		766 878 094	698 701 493	952 524 378	1 270 032 917

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.32

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		1 421 270 401	1 523 644 287	2 145 191 201	2 184 501 147
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	88 294 588	109 575 055	150 883 802	240 216 048
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	123 634 000	167 638 800	430 006 447	320 105 941
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	201 824 296	137 627 569	133 090 172	5 174 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	24 592 297	281 843 427	472 872 918	642 767 296
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	982 925 220	824 959 436	958 337 862	951 237 862
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	2 000 000	0	25 000 000
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		1 298 078 469	1 581 127 628	1 484 768 754	1 813 879 692
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	67 839 852	78 071 808	104 762 956	126 599 662
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	411 425 727	507 173 804	773 885 467	871 008 603
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	818 812 890	995 882 016	606 120 331	816 271 427
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		152 249 179	432 191 073	423 107 844	25 001 000
JUMLAH/ TOTAL		2 871 598 049	3 536 962 988	4 053 067 799	4 023 381 839

*) Data APBD

TABEL
TABLE 4.33

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF
EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE		2 962 081 087	2 767 756 097	3 293 803 214	4 460 857 122
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	585 515 744	559 412 361	643 842 872	710 902 949
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	442 780	61 440 130	133 847 556	849 817 450
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Assistance Expenditure</i>	500 127 971	391 137 477	283 208 629	219 031 522
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing Fund Expenditure</i>	104 319 214	109 328 770	103 669 062	108 336 720
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Assistance Expenditure</i>	1 723 487 561	1 640 726 759	2 126 256 726	2 529 102 563
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	48 187 817	5 710 600	2 978 369	43 665 918
B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE		2 332 117 851	2 882 718 795	2 996 572 499	2 721 776 272
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	240 640 555	217 653 418	222 943 523	180 980 921
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	891 988 195	1 260 514 917	1 351 970 752	1 514 970 806
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 199 489 101	1 404 550 460	1 421 658 224	1 025 824 545
C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING		943 623 400	153 364 209	893 108 210	187 968 488
JUMLAH/ TOTAL		6 237 822 338	5 803 839 101	7 183 483 923	7 370 601 882

*) Data APBD

TABEL

TABLE 5.

<http://www.bps.go.id>

TABEL
TABLE 5.A

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 198 662 228	2 361 186 746	2 527 577 357	3 646 912 385
2.	Sumatera Utara	2 066 194 068	1 991 472 765	2 339 178 887	5 022 928 596
3.	Sumatera Barat	769 822 721	1 031 743 732	1 150 643 751	1 688 938 887
4.	R i a u	1 640 706 475	1 633 624 557	1 726 941 928	3 221 363 309
5.	J a m b i	685 176 280	672 267 047	760 339 472	802 376 084
6.	Sumatera Selatan	1 048 976 962	1 167 117 282	2 007 450 230	2 835 367 647
7.	Bengkulu	393 018 762	521 635 607	494 038 124	812 535 037
8.	Lampung	1 053 357 172	968 441 248	1 143 029 305	1 044 931 071
9.	Bangka Belitung	447 618 758	379 877 151	496 255 478	837 610 056
10.	Kepulauan Riau	478 816 048	525 340 406	861 648 228	1 016 146 731
11.	DKI Jakarta	6 248 430 051	6 972 751 160	9 627 347 327	11 507 408 929
12.	Jawa Barat	5 691 756 883	6 265 732 992	7 606 879 466	12 410 127 669
13.	Jawa Tengah	3 212 099 612	3 796 513 884	5 259 700 529	8 298 693 582
14.	D I Yogyakarta	696 922 383	788 491 846	665 763 670	1 267 028 063
15.	Jawa Timur	4 318 899 232	5 869 745 632	6 589 867 568	9 436 506 403
16.	Banten	1 173 761 522	1 304 622 476	2 081 522 312	2 039 583 000
17.	B a l i	1 290 952 454	1 496 158 141	1 796 767 358	2 372 921 202
18.	Nusa Tenggara Barat	724 553 299	859 304 825	886 085 265	1 399 169 475
19.	Nusa Tenggara Timur	492 812 023	538 353 060	572 612 934	1 452 137 269
20.	Kalimantan Barat	750 990 445	774 185 007	930 490 053	1 699 268 452
21.	Kalimantan Tengah	496 250 002	622 766 793	712 053 813	1 247 605 983
22.	Kalimantan Selatan	962 700 759	1 142 533 972	1 195 209 614	1 803 998 516
23.	Kalimantan Timur	3 323 786 647	2 936 791 901	4 679 991 711	5 163 915 007
24.	Sulawesi Utara	518 508 871	632 041 039	626 908 175	1 038 759 753
25.	Sulawesi Tengah	467 376 968	504 698 487	698 081 241	999 793 464
26.	Sulawesi Selatan	1 236 898 965	1 500 511 910	1 820 969 739	3 376 343 378
27.	Sulawesi Tenggara	446 271 525	597 811 705	699 679 828	1 270 086 088
28.	Gorontalo	209 993 413	258 083 469	323 980 000	466 587 095
29.	Sulawesi Barat	103 782 681	125 638 652	207 595 524	395 774 452
30.	M a l u k u	384 430 188	378 672 694	426 861 315	849 583 191
31.	Maluku Utara	233 270 452	242 969 257	235 889 454	447 217 364
32.	Papua Barat	1 421 270 401	1 523 644 287	2 145 191 201	2 184 501 147
33.	P a p u a	2 962 081 087	2 767 756 097	3 293 803 214	4 460 857 122
JUMLAH/TOTAL		48 150 149 337	53 152 485 827	66 590 354 071	96 516 976 407

*) Data APBD

TABEL
5.A1
TABLE

REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012

ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	672 820 728	740 542 103	811 497 925	888 419 643
2.	Sumatera Utara	646 246 722	679 253 395	758 989 636	701 655 367
3.	Sumatera Barat	396 240 062	452 838 728	532 674 804	564 315 243
4.	R i a u	621 727 937	740 029 953	701 024 526	818 720 959
5.	J a m b i	326 068 007	336 141 292	386 627 385	427 729 484
6.	Sumatera Selatan	428 505 801	439 708 921	594 719 564	664 211 762
7.	Bengkulu	207 914 247	329 366 252	364 245 284	424 252 801
8.	Lampung	386 715 733	416 719 262	441 136 156	529 515 294
9.	Bangka Belitung	129 529 038	151 693 153	191 385 033	251 752 101
10.	Kepulauan Riau	176 695 579	162 989 135	192 313 329	206 254 531
11.	DKI Jakarta	5 874 593 713	6 513 005 171	8 757 472 026	10 043 911 142
12.	Jawa Barat	1 001 707 347	1 380 786 123	1 442 284 168	1 650 063 345
13.	Jawa Tengah	941 583 100	1 069 384 503	1 141 188 386	1 252 522 824
14.	D I Yogyakarta	310 260 956	335 693 916	387 412 234	490 659 484
15.	Jawa Timur	1 075 189 346	1 283 591 782	1 407 956 634	1 668 623 320
16.	Banten	294 424 404	280 475 124	320 486 551	367 476 000
17.	B a l i	427 346 486	465 179 737	521 535 198	779 639 484
18.	Nusa Tenggara Barat	357 906 776	385 403 837	426 228 699	476 970 431
19.	Nusa Tenggara Timur	301 120 938	330 954 210	403 101 909	476 859 775
20.	Kalimantan Barat	329 735 284	346 501 098	390 996 533	468 814 010
21.	Kalimantan Tengah	248 296 583	252 238 309	294 770 418	379 867 633
22.	Kalimantan Selatan	371 228 225	422 266 361	481 313 704	572 223 384
23.	Kalimantan Timur	356 634 431	405 321 821	697 747 236	908 136 950
24.	Sulawesi Utara	296 788 691	328 811 980	368 886 616	486 752 016
25.	Sulawesi Tengah	258 665 067	291 205 304	329 217 099	381 417 256
26.	Sulawesi Selatan	481 693 704	500 173 240	609 703 853	738 275 728
27.	Sulawesi Tenggara	286 532 407	312 193 785	346 075 531	468 384 606
28.	Gorontalo	136 588 902	165 232 594	187 796 432	238 269 991
29.	Sulawesi Barat	65 104 705	77 197 534	99 184 433	155 974 247
30.	M a l u k u	226 880 039	265 114 043	288 445 809	386 442 693
31.	Maluku Utara	143 280 152	163 837 449	154 479 487	206 467 693
32.	Papua Barat	88 294 588	109 575 055	150 883 802	240 216 048
33.	P a p u a	585 515 744	559 412 361	643 842 872	710 902 949
JUMLAH/TOTAL		18 451 835 442	20 692 837 531	24 825 623 272	29 025 698 194

*) Data APBD

TABEL 5.A2 REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 5.A2 ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	34 172	25 888	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	9 943 209	7 421 194	4 353 525	4 353 828
12.	Jawa Barat	0	0	0	0
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	45 778	19 464	0	0
15.	Jawa Timur	296 036	167 634	4 422 499	6 139 012
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	37 126	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	229 376	146 029	65 198	50 000
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	29 090 088
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	0	1 387 266	5 883 777	1 834 545
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		10 585 697	9 167 475	14 724 999	41 467 473

*) Data APBD

TABEL 5.A3 REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
**ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 873 157	598 869	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	11 033 095	15 272 310	0	14 172 000
5.	J a m b i	8 688 823	130 000	135 000	92 000
6.	Sumatera Selatan	0	0	1 217 160	2 606 945
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	993 561	1 251 750	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	10 394 197	12 194 120	8 962 780	10 000 000
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	4 509 360	4 479 600	3 999 840	4 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	6 542 700	4 929 176	2 994 069	250 000
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	16 721 050	20 623 607	20 580 943	20 623 711
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	8 755 602	1 928 000	1 662 444	4 500 000
29.	Sulawesi Barat	2 091 514	700 000	0	0
30.	M a l u k u	39 875 757	2 498 527	0	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
JUMLAH/TOTAL		116 478 816	64 605 959	39 552 236	56 244 656

*) Data APBD

TABEL
5.A4
TABLE

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	433 398 506	532 841 778	614 246 212	1 146 032 585
2.	Sumatera Utara	125 559 525	316 329 250	307 507 090	2 085 111 202
3.	Sumatera Barat	16 760 000	56 700 222	44 217 000	692 218 294
4.	R i a u	144 952 300	148 675 000	230 628 149	1 594 014 180
5.	J a m b i	7 438 278	64 358 881	22 187 375	23 549 000
6.	Sumatera Selatan	51 422 977	81 473 375	523 331 096	1 171 590 039
7.	Bengkulu	28 124 859	61 461 173	19 369 140	234 409 520
8.	Lampung	32 877 000	38 365 623	35 896 755	3 950 000
9.	Bangka Belitung	156 610 562	26 406 951	65 764 441	213 682 016
10.	Kepulauan Riau	47 932 814	114 556 707	82 918 650	281 946 200
11.	DKI Jakarta	305 274 309	423 468 762	825 595 987	1 367 244 871
12.	Jawa Barat	120 587 340	156 022 746	814 847 123	4 851 632 374
13.	Jawa Tengah	67 953 604	68 261 172	104 349 805	3 245 139 123
14.	D I Yogyakarta	15 550 887	89 895 292	17 578 562	355 793 657
15.	Jawa Timur	540 816 992	682 406 822	1 121 554 739	3 895 673 765
16.	Banten	57 693 815	92 374 984	349 780 525	289 420 000
17.	B a l i	15 637 208	190 010 205	226 902 827	744 942 853
18.	Nusa Tenggara Barat	29 666 258	116 432 115	138 283 581	569 794 120
19.	Nusa Tenggara Timur	4 788 548	6 819 140	6 747 249	796 088 400
20.	Kalimantan Barat	35 712 500	50 451 332	76 363 000	756 132 155
21.	Kalimantan Tengah	13 646 758	106 724 002	21 500 735	355 962 924
22.	Kalimantan Selatan	33 257 670	98 645 652	62 913 943	71 792 090
23.	Kalimantan Timur	410 142 815	356 170 000	683 777 651	740 588 100
24.	Sulawesi Utara	22 057 250	114 013 707	39 085 000	300 727 737
25.	Sulawesi Tengah	34 174 084	58 608 736	107 750 566	352 022 150
26.	Sulawesi Selatan	0	79 196 000	97 116 152	1 232 930 890
27.	Sulawesi Tenggara	17 724 952	7 860 207	9 616 003	377 619 350
28.	Gorontalo	14 694 719	16 142 400	66 763 216	143 330 890
29.	Sulawesi Barat	5 593 400	10 568 975	65 619 895	169 823 255
30.	M a l u k u	24 566 104	22 417 069	20 292 109	315 975 312
31.	Maluku Utara	11 709 420	11 381 334	2 347 000	178 963 010
32.	Papua Barat	123 634 000	167 638 800	430 006 447	320 105 941
33.	P a p u a	442 780	61 440 130	133 847 556	849 817 450
JUMLAH/TOTAL		2 950 402 234	4 428 118 542	7 368 705 579	29 728 023 453

*) Data APBD

TABEL 5.A5 REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 5.A5 ACTUAL SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	669 645 983	768 357 850	611 421 678	594 341 157
2.	Sumatera Utara	215 176 817	71 955 050	44 335 343	89 519 700
3.	Sumatera Barat	29 514 325	55 567 604	95 346 158	9 157 545
4.	R i a u	257 669 138	216 582 000	197 806 681	26 427 500
5.	J a m b i	22 222 754	37 191 082	56 918 574	4 235 000
6.	Sumatera Selatan	48 972 750	49 205 523	54 575 151	507 000
7.	Bengkulu	147 513 000	20 358 540	9 608 034	944 798
8.	Lampung	111 879 041	89 264 670	110 677 874	16 650 000
9.	Bangka Belitung	28 700 827	17 946 771	21 922 054	4 367 505
10.	Kepulauan Riau	72 112 807	74 480 407	189 914 670	97 445 000
11.	DKI Jakarta	58 020 461	27 517 450	38 587 206	31 190 000
12.	Jawa Barat	232 864 154	192 865 500	491 978 475	13 335 312
13.	Jawa Tengah	401 255 901	344 916 345	385 841 980	7 372 500
14.	D I Yogyakarta	96 290 500	88 513 100	114 820 605	95 736 448
15.	Jawa Timur	72 471 414	47 627 536	99 096 200	31 358 000
16.	Banten	48 116 100	51 428 250	79 829 561	28 750 000
17.	B a l i	305 087 740	313 295 312	361 339 672	27 957 760
18.	Nusa Tenggara Barat	84 700 290	96 006 383	99 291 085	92 984 393
19.	Nusa Tenggara Timur	46 753 319	49 739 498	65 081 292	52 421 990
20.	Kalimantan Barat	20 806 946	8 820 600	14 225 000	1 125 000
21.	Kalimantan Tengah	35 149 721	40 211 363	82 097 684	133 933 252
22.	Kalimantan Selatan	110 089 207	100 762 508	78 488 029	36 096 000
23.	Kalimantan Timur	189 786 674	103 863 200	130 812 760	115 780 000
24.	Sulawesi Utara	54 721 180	46 816 745	29 553 813	35 000 000
25.	Sulawesi Tengah	16 407 712	13 923 701	13 158 770	7 250 000
26.	Sulawesi Selatan	73 519 402	25 016 900	19 510 370	5 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	10 019 035	75 477 400	18 176 488	0
28.	Gorontalo	2 992 240	4 266 797	6 965 536	5 600 000
29.	Sulawesi Barat	8 476 557	6 814 352	4 384 472	12 826 950
30.	M a l u k u	35 648 605	23 821 897	26 361 523	5 530 000
31.	Maluku Utara	55 743 894	36 025 107	39 178 677	22 550 000
32.	Papua Barat	201 824 296	137 627 569	133 090 172	5 174 000
33.	P a p u a	500 127 971	391 137 477	283 208 629	219 031 522
JUMLAH/TOTAL		4 264 280 761	3 627 404 487	4 007 604 216	1 829 598 332

*) Data APBD

TABEL 5.A6 REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 5.A6 ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	313 843 984	312 466 642	236 584 907	271 000 000
2.	Sumatera Utara	656 050 047	609 775 367	801 034 520	714 259 949
3.	Sumatera Barat	266 352 364	290 666 129	402 995 188	406 556 947
4.	R i a u	530 344 005	459 865 294	511 015 529	593 344 670
5.	J a m b i	172 865 736	222 916 085	291 345 988	231 383 150
6.	Sumatera Selatan	377 068 040	478 165 062	373 395 018	500 000 000
7.	Bengkulu	0	99 105 386	100 815 666	138 032 451
8.	Lampung	407 169 916	378 733 817	406 965 252	286 430 000
9.	Bangka Belitung	106 455 806	115 637 811	132 893 987	205 183 591
10.	Kepulauan Riau	175 274 848	164 514 157	255 569 138	250 000 000
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	2 075 846 644	2 064 745 161	2 720 212 920	2 715 593 796
13.	Jawa Tengah	1 108 957 859	1 182 878 413	1 694 471 481	1 876 986 401
14.	D I Yogyakarta	198 385 862	214 667 402	0	251 788 474
15.	Jawa Timur	1 883 301 032	2 326 860 423	2 674 049 069	2 292 840 281
16.	Banten	581 405 598	736 769 053	1 016 068 937	983 951 000
17.	B a l i	453 053 519	485 833 043	640 351 377	680 261 435
18.	Nusa Tenggara Barat	164 138 371	201 232 154	176 666 844	180 501 621
19.	Nusa Tenggara Timur	74 459 462	96 124 597	88 049 947	100 954 604
20.	Kalimantan Barat	218 142 029	237 066 027	290 528 444	328 825 354
21.	Kalimantan Tengah	167 793 818	182 468 533	248 637 425	272 896 216
22.	Kalimantan Selatan	402 276 473	500 000 000	544 807 040	1 108 087 042
23.	Kalimantan Timur	716 581 090	901 354 888	1 863 896 580	1 851 972 500
24.	Sulawesi Utara	136 687 892	137 100 431	187 539 904	205 000 000
25.	Sulawesi Tengah	112 284 226	93 456 633	179 200 037	210 911 203
26.	Sulawesi Selatan	362 740 344	503 954 303	630 352 515	784 594 173
27.	Sulawesi Tenggara	60 160 658	79 660 625	73 047 479	104 260 189
28.	Gorontalo	38 157 153	39 430 333	51 024 380	54 676 214
29.	Sulawesi Barat	22 054 524	29 262 966	35 104 574	45 000 000
30.	M a l u k u	44 793 866	60 881 792	59 843 044	91 801 319
31.	Maluku Utara	21 596 986	31 225 367	37 742 597	34 336 661
32.	Papua Barat	24 592 297	281 843 427	472 872 918	642 767 296
33.	P a p u a	104 319 214	109 328 770	103 669 062	108 336 720
JUMLAH/TOTAL		11 977 153 663	13 627 990 091	17 300 751 767	18 522 533 257

*) Data APBD

TABEL
5.A7
TABLE

REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012
ACTUAL FINANCIAL ASSISTANCE EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	100 000 000	0	204 184 835	597 119 000
2.	Sumatera Utara	420 526 785	313 433 815	427 157 798	1 422 382 378
3.	Sumatera Barat	58 531 460	172 924 980	68 280 083	10 253 900
4.	R i a u	73 880 000	43 200 000	86 365 493	163 907 000
5.	J a m b i	145 217 847	9 900 000	0	105 387 450
6.	Sumatera Selatan	142 441 358	117 977 676	459 523 741	488 766 248
7.	Bengkulu	3 000 000	3 944 789	0	2 959 202
8.	Lampung	23 157 821	18 000 000	113 366 500	186 500 000
9.	Bangka Belitung	24 828 964	66 041 565	84 289 963	156 888 054
10.	Kepulauan Riau	5 000 000	8 500 000	140 932 441	179 501 000
11.	DKI Jakarta	598 359	1 338 583	1 338 583	1 350 000
12.	Jawa Barat	2 250 355 551	2 458 555 862	2 127 594 000	2 995 624 196
13.	Jawa Tengah	687 190 390	1 116 008 176	1 931 020 531	1 886 672 734
14.	D I Yogyakarta	76 388 400	56 967 000	145 929 020	53 050 000
15.	Jawa Timur	746 137 792	1 503 834 280	1 237 764 963	1 490 172 025
16.	Banten	190 121 605	139 455 065	315 290 000	364 986 000
17.	B a l i	79 755 937	24 486 688	33 256 221	106 699 649
18.	Nusa Tenggara Barat	80 725 984	53 986 075	40 632 980	68 668 910
19.	Nusa Tenggara Timur	59 684 237	46 618 785	8 792 886	15 812 500
20.	Kalimantan Barat	146 523 985	129 787 680	158 377 076	139 371 933
21.	Kalimantan Tengah	14 491 572	18 927 354	42 852 965	47 865 001
22.	Kalimantan Selatan	43 720 897	18 650 302	25 948 829	11 100 000
23.	Kalimantan Timur	1 650 627 262	1 170 081 992	1 303 592 971	1 537 437 457
24.	Sulawesi Utara	6 000 000	4 000 000	1 043 603	1 280 000
25.	Sulawesi Tengah	45 845 879	47 504 113	66 280 191	41 492 855
26.	Sulawesi Selatan	318 120 459	389 647 141	463 265 651	550 492 587
27.	Sulawesi Tenggara	70 729 017	120 671 756	250 939 327	262 928 740
28.	Gorontalo	8 554 797	30 930 988	8 098 192	15 210 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	3 011 500	8 650 000
30.	M a l u k u	4 052 260	966 655	7 668 832	27 999 322
31.	Maluku Utara	0	0	900 000	900 000
32.	Papua Barat	982 925 220	824 959 436	958 337 862	951 237 862
33.	P a p u a	1 723 487 561	1 640 726 759	2 126 256 726	2 529 102 563
JUMLAH/TOTAL		10 182 621 399	10 552 027 515	12 842 293 763	16 421 768 566

*) Data APBD

TABEL 5.A8 REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE 5.A8 ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 079 870	6 379 504	49 641 800	150 000 000
2.	Sumatera Utara	2 600 000	700 000	154 500	10 000 000
3.	Sumatera Barat	2 424 510	3 046 069	7 130 518	6 436 958
4.	R i a u	1 100 000	10 000 000	101 550	10 777 000
5.	J a m b i	2 674 835	1 629 707	3 125 150	10 000 000
6.	Sumatera Selatan	566 036	586 725	688 500	7 685 653
7.	Bengkulu	6 466 656	7 399 467	0	11 936 265
8.	Lampung	91 557 661	27 357 876	34 986 768	21 885 777
9.	Bangka Belitung	500 000	899 150	0	5 736 789
10.	Kepulauan Riau	1 800 000	300 000	0	1 000 000
11.	DKI Jakarta	0	0	0	59 359 088
12.	Jawa Barat	1 650	563 480	1 000 000	173 878 646
13.	Jawa Tengah	5 158 758	15 065 275	2 828 346	30 000 000
14.	D I Yogyakarta	0	2 735 672	23 249	20 000 000
15.	Jawa Timur	686 620	25 257 155	45 023 464	51 700 000
16.	Banten	2 000 000	4 120 000	66 738	5 000 000
17.	B a l i	5 562 204	12 873 556	9 382 223	29 420 021
18.	Nusa Tenggara Barat	872 920	1 315 085	1 988 007	10 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	6 005 519	8 096 830	839 651	10 000 000
20.	Kalimantan Barat	69 701	1 558 270	0	5 000 000
21.	Kalimantan Tengah	150 500	1 573 625	1 613 643	36 457 246
22.	Kalimantan Selatan	2 091 161	2 209 149	1 738 069	4 700 000
23.	Kalimantan Timur	14 375	0	164 513	10 000 000
24.	Sulawesi Utara	2 253 858	1 298 176	799 239	10 000 000
25.	Sulawesi Tengah	0	0	2 474 578	6 700 000
26.	Sulawesi Selatan	595 680	2 378 297	956 000	65 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	1 105 456	1 947 932	1 825 000	27 803 115
28.	Gorontalo	250 000	152 357	1 669 800	5 000 000
29.	Sulawesi Barat	461 981	1 094 825	290 650	3 500 000
30.	M a l u k u	8 613 557	1 585 445	18 366 221	20 000 000
31.	Maluku Utara	940 000	500 000	1 241 693	4 000 000
32.	Papua Barat	0	2 000 000	0	25 000 000
33.	P a p u a	48 187 817	5 710 600	2 978 369	43 665 918
JUMLAH/TOTAL		196 791 325	150 334 227	191 098 239	891 642 476

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.B

REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012

ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	5 444 184 777	5 167 329 622	4 847 047 931	5 865 026 304
2.	Sumatera Utara	1 378 366 514	1 675 233 409	2 272 298 276	2 654 923 781
3.	Sumatera Barat	887 581 198	1 208 009 760	1 178 121 323	1 432 228 336
4.	R i a u	2 116 774 369	2 633 808 101	2 538 187 733	3 145 292 773
5.	J a m b i	844 896 912	815 863 303	989 902 384	1 140 127 473
6.	Sumatera Selatan	1 292 350 129	1 940 919 350	1 798 629 605	1 907 084 625
7.	Bengkulu	539 471 542	449 562 954	515 176 929	773 619 892
8.	Lampung	793 750 676	1 036 457 939	1 423 049 501	1 793 318 874
9.	Bangka Belitung	406 635 485	482 838 623	680 428 338	612 409 203
10.	Kepulauan Riau	1 369 537 165	1 198 234 307	1 085 945 217	1 371 642 847
11.	DKI Jakarta	13 251 881 680	14 580 144 679	16 796 334 862	22 319 622 721
12.	Jawa Barat	2 501 857 027	2 754 875 029	2 688 690 379	3 394 169 310
13.	Jawa Tengah	1 988 013 501	2 171 519 886	2 517 005 298	2 947 050 711
14.	D I Yogyakarta	630 565 465	566 102 212	628 457 725	857 260 646
15.	Jawa Timur	3 283 139 576	4 336 571 471	5 096 053 104	5 717 182 698
16.	Banten	1 247 059 419	1 529 948 052	1 819 695 803	2 094 492 000
17.	B a l i	520 146 882	489 691 916	768 034 137	1 283 712 033
18.	Nusa Tenggara Barat	375 984 593	416 441 760	764 516 010	855 387 669
19.	Nusa Tenggara Timur	532 633 795	609 729 330	659 269 779	695 217 394
20.	Kalimantan Barat	876 021 859	926 017 322	1 065 833 493	1 203 140 401
21.	Kalimantan Tengah	975 028 246	854 581 382	812 290 457	1 001 138 221
22.	Kalimantan Selatan	1 142 592 296	1 267 561 372	1 270 524 101	1 304 945 113
23.	Kalimantan Timur	2 985 472 214	2 981 776 194	3 463 280 908	5 338 698 093
24.	Sulawesi Utara	515 919 011	505 382 406	658 956 657	779 209 289
25.	Sulawesi Tengah	592 355 452	622 558 234	728 001 093	931 405 951
26.	Sulawesi Selatan	885 292 826	985 647 855	1 356 073 571	1 384 598 687
27.	Sulawesi Tenggara	673 428 860	527 876 246	628 344 872	751 620 482
28.	Gorontalo	409 334 481	308 996 973	400 548 423	471 814 732
29.	Sulawesi Barat	486 381 131	482 033 514	523 772 291	573 234 378
30.	M a l u k u	631 377 457	571 608 481	683 060 114	580 287 070
31.	Maluku Utara	526 245 692	439 753 927	488 485 594	722 815 553
32.	Papua Barat	1 298 078 469	1 581 127 628	1 484 768 754	1 813 879 692
33.	P a p u a	2 332 117 851	2 882 718 795	2 996 572 499	2 721 776 272
JUMLAH/TOTAL		53 734 476 550	59 000 922 032	65 627 357 161	80 438 333 224

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.B.1

**REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012**
**ACTUAL DIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012**

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	288 692 582	295 570 080	252 925 171	325 975 208
2.	Sumatera Utara	161 214 215	138 095 739	156 928 569	189 769 143
3.	Sumatera Barat	66 105 352	79 094 896	90 591 859	98 835 282
4.	R i a u	288 674 411	330 284 401	235 117 018	253 419 144
5.	J a m b i	50 985 048	53 961 942	68 132 244	83 046 360
6.	Sumatera Selatan	302 708 009	476 970 696	107 182 811	64 708 756
7.	Bengkulu	75 619 091	44 005 108	56 696 707	72 556 956
8.	Lampung	73 709 559	84 733 817	107 811 859	126 130 602
9.	Bangka Belitung	41 743 919	33 420 443	36 150 068	51 362 273
10.	Kepulauan Riau	219 272 896	179 428 467	140 004 976	178 689 711
11.	DKI Jakarta	1 672 843 080	2 024 843 081	1 138 088 013	1 362 027 558
12.	Jawa Barat	356 753 290	255 873 493	317 690 461	358 041 375
13.	Jawa Tengah	213 820 985	209 968 578	240 493 048	338 586 899
14.	D I Yogyakarta	86 714 402	98 929 829	111 340 357	111 505 041
15.	Jawa Timur	483 186 941	668 598 067	895 165 704	969 382 980
16.	Banten	106 741 193	110 267 532	129 669 563	142 946 249
17.	B a l i	35 605 364	18 489 741	31 609 717	53 454 514
18.	Nusa Tenggara Barat	45 188 420	55 334 233	37 987 372	74 646 947
19.	Nusa Tenggara Timur	45 453 468	60 105 893	71 725 069	106 796 297
20.	Kalimantan Barat	61 145 490	58 641 977	76 343 884	86 243 560
21.	Kalimantan Tengah	56 373 955	60 521 483	64 050 675	70 195 990
22.	Kalimantan Selatan	78 666 387	97 580 931	108 353 995	115 588 258
23.	Kalimantan Timur	416 481 970	472 870 254	279 925 762	355 777 197
24.	Sulawesi Utara	38 377 867	48 481 823	55 670 172	54 819 105
25.	Sulawesi Tengah	58 952 351	59 207 689	75 293 666	105 305 837
26.	Sulawesi Selatan	121 502 604	122 037 635	146 363 314	161 556 260
27.	Sulawesi Tenggara	111 288 327	64 253 626	62 281 697	64 607 470
28.	Gorontalo	24 664 746	21 769 939	27 894 843	36 290 327
29.	Sulawesi Barat	45 749 520	56 863 864	60 784 227	78 686 067
30.	M a l u k u	74 958 073	54 342 524	75 806 228	62 153 073
31.	Maluku Utara	63 777 116	39 362 004	51 878 753	50 303 050
32.	Papua Barat	67 839 852	78 071 808	104 762 956	126 599 662
33.	P a p u a	240 640 555	217 653 418	222 943 523	180 980 921
JUMLAH/TOTAL		6 075 451 038	6 669 635 011	5 637 664 281	6 510 988 072

*) Data APBD

TABEL 5.B.2 REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2009-2012
TABLE *ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012*

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 459 188 116	1 603 848 155	3 120 139 312	4 538 991 461
2.	Sumatera Utara	512 815 247	820 332 048	1 052 132 331	1 556 120 871
3.	Sumatera Barat	359 444 050	545 847 300	493 293 534	607 505 613
4.	R i a u	708 706 089	882 439 925	960 890 615	1 342 392 563
5.	J a m b i	348 230 502	296 041 040	403 019 557	562 162 059
6.	Sumatera Selatan	348 977 879	430 678 144	552 326 637	830 586 449
7.	Bengkulu	214 738 228	240 495 882	237 590 663	379 452 730
8.	Lampung	486 751 068	525 914 922	683 987 620	909 604 793
9.	Bangka Belitung	126 756 627	136 056 175	156 720 935	238 481 111
10.	Kepulauan Riau	426 505 931	367 237 269	686 032 380	859 241 265
11.	DKI Jakarta	6 773 237 465	7 312 154 901	8 341 913 514	10 013 188 999
12.	Jawa Barat	1 418 622 576	1 443 464 795	1 652 349 083	1 751 553 738
13.	Jawa Tengah	1 227 133 928	1 542 074 984	1 812 185 242	1 946 778 445
14.	D I Yogyakarta	350 913 012	339 709 271	374 323 535	527 796 940
15.	Jawa Timur	1 962 652 643	2 790 096 474	3 155 525 486	3 685 777 302
16.	Banten	457 752 098	593 057 823	972 617 438	916 577 300
17.	B a l i	277 484 606	269 734 074	509 304 627	772 160 232
18.	Nusa Tenggara Barat	196 983 101	216 550 122	276 464 886	390 365 043
19.	Nusa Tenggara Timur	281 930 798	373 064 516	392 209 058	382 864 996
20.	Kalimantan Barat	450 379 483	490 478 825	570 405 689	736 942 729
21.	Kalimantan Tengah	291 817 269	252 766 611	315 899 790	419 564 314
22.	Kalimantan Selatan	437 269 809	492 679 168	565 324 723	662 465 003
23.	Kalimantan Timur	705 567 895	854 936 271	1 407 152 366	2 296 981 573
24.	Sulawesi Utara	236 257 494	292 540 520	369 656 152	372 854 645
25.	Sulawesi Tengah	321 587 887	359 558 245	444 210 633	526 875 773
26.	Sulawesi Selatan	467 927 554	559 961 996	742 024 940	859 237 928
27.	Sulawesi Tenggara	260 377 147	228 258 763	224 565 348	290 011 851
28.	Gorontalo	206 395 928	178 230 008	225 445 501	288 109 219
29.	Sulawesi Barat	198 827 504	220 105 790	232 296 315	346 020 186
30.	M a l u k u	384 271 757	358 404 729	352 314 914	362 832 700
31.	Maluku Utara	209 412 283	207 866 680	248 539 893	333 185 500
32.	Papua Barat	411 425 727	507 173 804	773 885 467	871 008 603
33.	P a p u a	891 988 195	1 260 514 917	1 351 970 752	1 514 970 806
JUMLAH/TOTAL		23 412 329 896	26 992 274 147	33 656 718 936	42 092 662 740

*) Data APBD

TABEL 5.B.3 REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012
TABLE ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 696 304 079	3 267 911 387	1 473 983 448	1 000 059 635
2.	Sumatera Utara	704 337 052	716 805 622	1 063 237 376	909 033 767
3.	Sumatera Barat	462 031 796	583 067 564	594 235 930	725 887 441
4.	R i a u	1 119 393 869	1 421 083 775	1 342 180 100	1 549 481 066
5.	J a m b i	445 681 362	465 860 321	518 750 583	494 919 054
6.	Sumatera Selatan	640 664 241	1 033 270 510	1 139 120 157	1 011 789 420
7.	Bengkulu	249 114 223	165 061 964	220 889 559	321 610 206
8.	Lampung	233 290 049	425 809 200	631 250 022	757 583 479
9.	Bangka Belitung	238 134 939	313 362 005	487 557 335	322 565 819
10.	Kepulauan Riau	723 758 338	651 568 571	259 907 861	333 711 871
11.	DKI Jakarta	4 805 801 135	5 243 146 697	7 316 333 335	10 944 406 164
12.	Jawa Barat	726 481 161	1 055 536 741	718 650 835	1 284 574 197
13.	Jawa Tengah	547 058 588	419 476 324	464 327 008	661 685 367
14.	D I Yogyakarta	192 938 051	127 463 112	142 793 833	217 958 665
15.	Jawa Timur	837 299 992	877 876 930	1 045 361 914	1 062 022 416
16.	Banten	682 566 128	826 622 697	717 408 802	1 034 968 451
17.	B a l i	207 056 912	201 468 101	227 119 793	458 097 287
18.	Nusa Tenggara Barat	133 813 072	144 557 405	450 063 752	390 375 679
19.	Nusa Tenggara Timur	205 249 529	176 558 921	195 335 652	205 556 101
20.	Kalimantan Barat	364 496 886	376 896 520	419 083 920	379 954 112
21.	Kalimantan Tengah	626 837 022	541 293 288	432 339 992	511 377 917
22.	Kalimantan Selatan	626 656 100	677 301 273	596 845 383	526 891 852
23.	Kalimantan Timur	1 863 422 349	1 653 969 669	1 776 202 780	2 685 939 323
24.	Sulawesi Utara	241 283 650	164 360 063	233 630 333	351 535 539
25.	Sulawesi Tengah	211 815 214	203 792 300	208 496 794	299 224 341
26.	Sulawesi Selatan	295 862 668	303 648 224	467 685 317	363 804 499
27.	Sulawesi Tenggara	301 763 386	235 363 857	341 497 827	397 001 161
28.	Gorontalo	178 273 807	108 997 026	147 208 079	147 415 186
29.	Sulawesi Barat	241 804 107	205 063 860	230 691 749	148 528 125
30.	M a l u k u	172 147 627	158 861 228	254 938 972	155 301 297
31.	Maluku Utara	253 056 293	192 525 243	188 066 948	339 327 003
32.	Papua Barat	818 812 890	995 882 016	606 120 331	816 271 427
33.	P a p u a	1 199 489 101	1 404 550 460	1 421 658 224	1 025 824 545
JUMLAH/TOTAL		24 246 695 616	25 339 012 874	26 332 973 944	31 834 682 412

*) Data APBD

TABEL
TABLE 5.C

REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA
(ribu rupiah), 2009-2012

ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT
INDONESIA (thousand rupiahs), 2009-2012

No.	Provinsi/Province	2009	2010	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 415 001 063	1 282 287 393	1 542 421 072	7 000 000
2.	Sumatera Utara	378 589 070	565 463 428	751 889 462	354 712 416
3.	Sumatera Barat	682 866 528	355 105 212	77 617 334	72 293 000
4.	R i a u	345 508 122	194 000 000	1 596 831 277	75 000 000
5.	J a m b i	210 128 877	353 260 385	681 825 442	0
6.	Sumatera Selatan	345 043 084	431 373 607	548 219 953	409 900 000
7.	Bengkulu	200 570 145	40 232 218	197 445 911	0
8.	Lampung	78 951 378	165 814 010	123 093 725	15 000 000
9.	Bangka Belitung	266 136 770	249 439 075	257 245 782	10 000 000
10.	Kepulauan Riau	2 600 000	372 188 859	304 291 009	23 500 000
11.	DKI Jakarta	4 197 955 215	5 221 603 301	6 799 757 252	2 196 313 207
12.	Jawa Barat	2 049 472 840	2 511 336 444	3 208 032 615	393 000 000
13.	Jawa Tengah	1 180 364 556	1 562 639 507	1 010 039 769	150 000 000
14.	D I Yogyakarta	244 404 316	276 179 393	564 921 400	32 574 600
15.	Jawa Timur	2 286 902 536	1 769 981 099	1 372 238 293	618 341 577
16.	Banten	252 995 508	540 362 606	390 244 507	32 000 000
17.	B a l i	559 236 657	790 310 153	801 660 774	50 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	136 896 845	69 986 315	56 030 004	49 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	266 235 727	164 101 590	212 822 303	89 824 000
20.	Kalimantan Barat	173 032 329	251 734 083	437 627 574	50 000 000
21.	Kalimantan Tengah	42 057 470	135 963 494	529 701 185	28 000 000
22.	Kalimantan Selatan	553 537 508	362 341 273	1 007 187 782	48 500 000
23.	Kalimantan Timur	1 046 876 135	1 934 557 684	3 326 264 857	100 000 000
24.	Sulawesi Utara	388 025 574	368 273 478	189 114 091	0
25.	Sulawesi Tengah	182 111 792	227 405 397	205 216 673	6 000 000
26.	Sulawesi Selatan	237 264 440	308 364 369	224 038 277	0
27.	Sulawesi Tenggara	35 484 949	35 683 286	159 688 045	5 000 000
28.	Gorontalo	65 134 763	91 405 185	69 891 823	35 000 000
29.	Sulawesi Barat	23 960 693	25 926 974	13 254 702	2 000 000
30.	M a l u k u	57 602 183	60 765 218	83 751 369	4 987 135
31.	Maluku Utara	7 361 950	15 978 309	228 149 330	100 000 000
32.	Papua Barat	152 249 179	432 191 073	423 107 844	25 001 000
33.	P a p u a	943 623 400	153 364 209	893 108 210	187 968 488
JUMLAH/TOTAL		20 008 181 602	21 319 618 627	28 286 729 646	5 170 915 423

*) Data APBD

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAHAN PROVINSI 2009-2012

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Sentot Bangun Widoyono, M.A.

Editor : Mila Hertinmalyana, M.Comm.
Agus Nuwibowo, S.Si., M.M.

Penulis : Desy Apresziyanti, SST

Pengolah Data : Ruri Kartika Sari

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

